



Volume 1 No 4 | Oktober 2016

mediaBPP

Jendela Informasi Kelitbangan

DAERAH

PERTUNJUKKAN SENI WAYANG BHARATA, JAKARTA
**TETAP HIDUP
DI TENGAH MODERNITAS**



LAPORAN UTAMA

MEWACANAKAN HARI PENELITI NASIONAL

TOKOH

**SEJAK KECIL SELALU PENASARAN
PROF. DR. ISKANDAR ZULKARNAIN
(KEPALA LIPI)**



<http://litbang.kemendagri.go.id>
Majalah Dwi Bulanan
p-ISSN 2503 3352
e-ISSN 2528 4181

Terima kasih kepada Bapak **DRS. DOMOE ABDIE, M.SI**

yang telah mencurahkan
segenap perhatian, tenaga,
dan pikiran untuk kemajuan
BPP Kemendagri



Sepertinya sudah menjadi rahasia umum, jika minat orang Indonesia menjadi peneliti masih rendah. Dukungan pemerintah untuk melahirkan peneliti yang mumpuni masih setengah hati.

Mulai dari anggaran penelitian, SDM (Sumber Daya Manusia), pendidikan dan intensif untuk para peneliti, serta berbagai permasalahan lainnya. Itulah yang menjadi latar belakang BPP Kemendagri membangun wacana Hari Peneliti Nasional. Di Hari yang bercita-cita mulia itu, kami berharap peneliti memunyai ruang atau wadah untuk menginspirasi segala kemampuannya di dunia riset dalam rangka memajukan pembangunan bangsa.

Beberapa peneliti yang kami wawancarai sepakat peneliti membutuhkan hari di mana profesi mulianya dihargai, mendapatkan tempat, dan dihargai oleh bangsa. Meski hakikatnya penghargaan peneliti tidak cukup dalam satu hari, tapi Hari Peneliti Nasional diharapkan menjadi representatif wujud perhatian pemerintah terhadap peneliti. Cita-cita mulia yang berawal dari buah pemikiran Plt. Kepala BPP Kemendagri itulah kami rangkum dalam sebuah laporan utama Media BPP Edisi Oktober 2016.

Tidak hanya itu, dalam rubrik yang lain kami banyak

menyuguhkan serangkaian kegiatan yang terus dilakukan BPP Kemendagri sebagai komponen yang aktif dan berperan dalam hal kebijakan pemerintah.

Memasuki bulan ke-9 hingga ke 10 tahun 2016 ini, ada banyak sekali serangkaian kegiatan dan momentum berharga. Mulai dari Sosialisasi Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri, perancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah yang melewati perdebatan panjang, pelantikan pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan BPP Kemendagri. Semuanya kami rangkum dalam rubrik Aktivitas.

Selain itu, ada cerita bagaimana perjalanan BPP Daerah juga tetap eksis di tengah keterbatasan dan desakan penilaian klasifikasi BPP Daerah bertipe. Kami selalu berusaha menyuguhkan yang terbaik dalam kinerja, dan tetap eksis dalam bidang penelitian.

Dengan begitu kami berharap semua pihak terutama pemerintah dapat merespon positif maksud baik Wacana Hari Peneliti ini, dengan pembuktian eksistensi peneliti dalam pembangunan bangsa, yang kami rangkum semuanya melalui peliputan. Agar stigma penelitian dan pengembangan tidak lagi "Sulit Berkembang" tapi "Elit dan Membanggakan".

Redaksi

mediaBPP

Diterbitkan oleh
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Media BPP menerima Opini, Cerpen,
dan Surat Pembaca.
Kirimkan Opini, Cerpen, dan Surat Pembaca Anda
melalui surel kami ke alamat di bawah ini.

Alamat Redaksi
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
mediabppkemendagri@gmail.com

PELINDUNG	MENTERI DALAM NEGERI Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB	Domoe Abdie
PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDAKTUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Syabnikmat Nizam Subiyono Rochayati Basra Indrajaya Ramzie
PENYUNTING	Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy Niyan Nurin Ridha Putri
PELIPUTAN	M. Saidi Rifky Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	M. Saidi Rifky

Tim Redaksi:

 **mediaBPP**
Jendela Informasi Kelitbangan

Regulasi PTT

Bekerja di BPP Kemendagri sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) bagi saya sangat menyenangkan dan menarik. Karena apa? Karena kebetulan pekerjaan di sini sesuai dengan bidang saya sewaktu kuliah dulu, yakni Administrasi Negara UI. Sehingga saya merasa dapat mengaplikasikan ilmu saya di bangku kuliah dulu. Seperti membuat regulasi atau peraturan dari segi substansi, membuat undangan, surat tugas, notulensi, dll.

Namun sayangnya, di Kemendagri sendiri belum ada kejelasan mengenai kesejahteraan jangka panjang tenaga honorer/PTT seperti saya. Padahal pemerintah memberikan peluang bagi honorer/PTT melalui Tes CPNS K2 (Tenaga Honorer Kategori II) sebagai penentu kesejahteraan tenaga honorer ke depannya.

Dalam perekrutan pegawai, Kemendagri belum menempatkan PTT sebagai prioritasnya, tapi selalu mengandalkan lulusan IPDN (Institut Pegawai Dalam Negeri). Untuk itu, saya berharap Kemendagri dapat memprioritaskan PTT sebagai tenaga pendukung kinerja Kemendagri yang mendapatkan kesejahteraan jangka panjang. Sehingga, kami tidak terkatung-katung menanti kesejahteraan dan perpanjangan kontrak setiap akhir tahun.

Ibrahim Hadi Purindra
PTT Bagian Perencanaan BPP Kemendagri

PTT (Pegawai Tidak Tetap) dalam lingkup komponen BPP Kemendagri memang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pegawai Tidak Tetap/ Supporting Staff di Lingkungan Sekretariat BPP Kemendagri yang berubah setiap tahunnya. Dalam peraturan tersebut, setiap 11 bulan PTT selalu ada perpanjangan kontrak, atau tidak bekerja lagi di lingkup BPP Kemendagri. Memang, Tes CPNS K2 tidak diterapkan pada lingkup komponen Kemendagri, karena Pemerintah Indonesia sendiri memprioritaskan tes tersebut untuk tenaga honorer seperti Guru dan Perawat. Tapi, kami senantiasa berharap ada perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan tenaga honorer/PTT di lingkup Kemendagri baik melalui tes CPNS K2 atau berupa yang lain. Semoga jawaban di atas dapat membantu ya Sdra. Ibrahim. Terimakasih.

Redaksi

Masukan untuk Media BPP

Tampilan Media BPP saat ini sudah sangat maju dan berkembang dibandingkan dengan penerbitan pada tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi isi dan variasi berita, kualitas tulisan berita/informasi sampai dengan packaging-nya. Hanya saja, ada beberapa masukan dari saya agar Media BPP menjadi semakin lebih baik lagi.

Pertama, mengenai pemberitaan internal dan eksternal BPP Kemendagri sebaiknya lebih berimbang lagi

komposisinya. Jangan terlalu banyak berita eksternal BPP Kemendagri, sehingga menjadi stimulus bagi unit kerja BPP agar dapat meningkatkan kinerja dan performanya jika setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan menjadi bahan pemberitaan.

Kedua, untuk mendukung semangat berinovasi, ada baiknya dalam setiap edisi menampilkan etalase inovasi daerah, baik berupa produk maupun sistem yang telah diterapkan oleh suatu daerah, sehingga dapat direplikasi oleh daerah lain yang belum berinovasi.

Ketiga, agar lebih menarik dan tidak terkesan membosankan, sebaiknya redaksi bisa menambahkan rubrik permainan, seperti teka-teki silang, sudoku, mencari kata, mencari perbedaan, dll.

Imaniar Eka Wulandari
JFU Penyusunan Program dan Anggaran

Terimakasih sekali Sdri. Ima atas masukan dan kritiknya. Beberapa hal yang perlu tanggapi, Pertama mengenai komposisi pemberitaan. Selama ini kami sangat terbuka jika beberapa Pusat, Bagian atau Sub Bagian BPP Kemendagri mengadakan acara/kegiatan yang ingin kami liput. Hanya saja baru beberapa Bagian yang mengabari kami dan ingin diliput, untuk itu kami sangat senang jika diundang atau sekadar mampir ke ruangan redaksi Media BPP untuk memberitahu jadwal acaranya. Kedua, mengenai inovasi daerah. Rencananya kami memang akan membahas mengenai hal tersebut di penerbitan Desember sebagai Laporan Utama kami yang juga berkaitan dengan RPP Inovasi Daerah yang dirancang oleh BPP Kemendagri. Lalu terakhir terkait rubrik hiburan, kami akan coba menerima masukan dari Sdri. Ima, semoga tahun depan rubrik ini bisa tampil dalam Media BPP.

Redaksi

Meningkatkan Fasilitas BPP

Sarana dan prasana BPP Kemendagri saat ini sudah cukup meningkat dari tahun ke tahun, hanya saja harus ada peningkatan secara bertahap untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitas pegawainya agar menjadi lebih baik lagi. Seperti ruang rapat yang ada di BPP, khususnya Ruang Rapat 4 yang terkesan kurang perhatian. Saya berharap di masa yang akan datang BPP lebih mengoptimalkan lagi sarana, prasarana, dan perawatannya untuk menunjang kegiatan pegawainya.

Hamdhani Dani

Terimakasih Sdr. Dhani telah memberikan masukan dan beberapa saran terkait fasilitas BPP. Semoga surat pembaca dari saudara dapat dilihat oleh Bagian Rumah Tangga, sehingga bisa meningkatkan kualitas fasilitas sarana prasana BPP Kemendagri.

Redaksi

BPP DAERAH 26-29**Provinsi Kalimantan Timur
Nuklir untuk Rakyat**

Kepercayaan untuk mengawal program nuklir dari Gubernur Kaltim tidak di sia-siakan oleh BPP Kaltim. di tengah pro kontra wacana energi nuklir, BPP Kaltim mampu mengubah nuklir menjadi sesuatu yang berbeda.

**Provinsi Kalimantan Barat
Inovasi Di Tengah Keterbatasan**

Lahirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menelurkan sejumlah keputusan yang mengharuskan organisasi perangkat daerah termasuk BPP, untuk terus bergerak maju dan berkomitmen tinggi dalam membantu tugas pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembentukan Badan secara mandiri

AKTIVITAS

Sosialisasi Permendagri
17Tahun 2016 **8**
SIKERJA **9**
Pelantikan Pejabat BPP **9**
Penyempurnaan Draf
RPP Inovda **10**
RPP Inovda Bicara SIDA **12**

TOKOH

Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain
(Kepala LIPI) **36**

SASTRA

Mbah Tugiyem **50**

KOMIK 49**RESENSI FILM**

Sosok Dibalik Penulis
Buku Sihir Hogwarts **44**

RESENSI BUKU

Perjalanan Panjang
Pilkada Serentak **46**

KILAS BERITA 34-35**GAYA HIDUP**

Detri Warmanto, Sangat
Lengket Dengan Anak **40**

Tips Kembali Bentuk
Tubuh Pasca Melahirkan **42**

OPINI

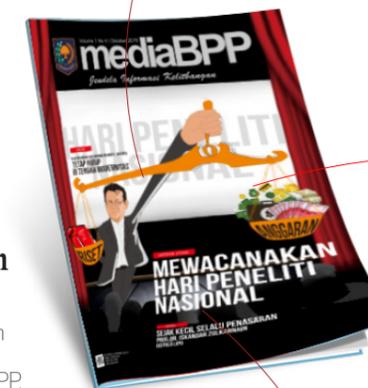
Mencermati Kebijakan
Peneliti Rangkap
Jabatan **54**
Meningkatkan Kepemilikan
Akta Kelahiran **56**

CATATAN

Fenomena Dukun
Merajalela **58**

DAERAH 30**TETAP HIDUP DI TENGAH MODERNITAS**

Ketika banyak kelompok kesenian wayang orang bertumbangan karena tergerus zaman, eksistensi Paguyuban Wayang Orang Bharata juga menarik untuk dibicarakan. kelompok yang berdiri sejak 1972 ini masih bertahan sampai sekarang.

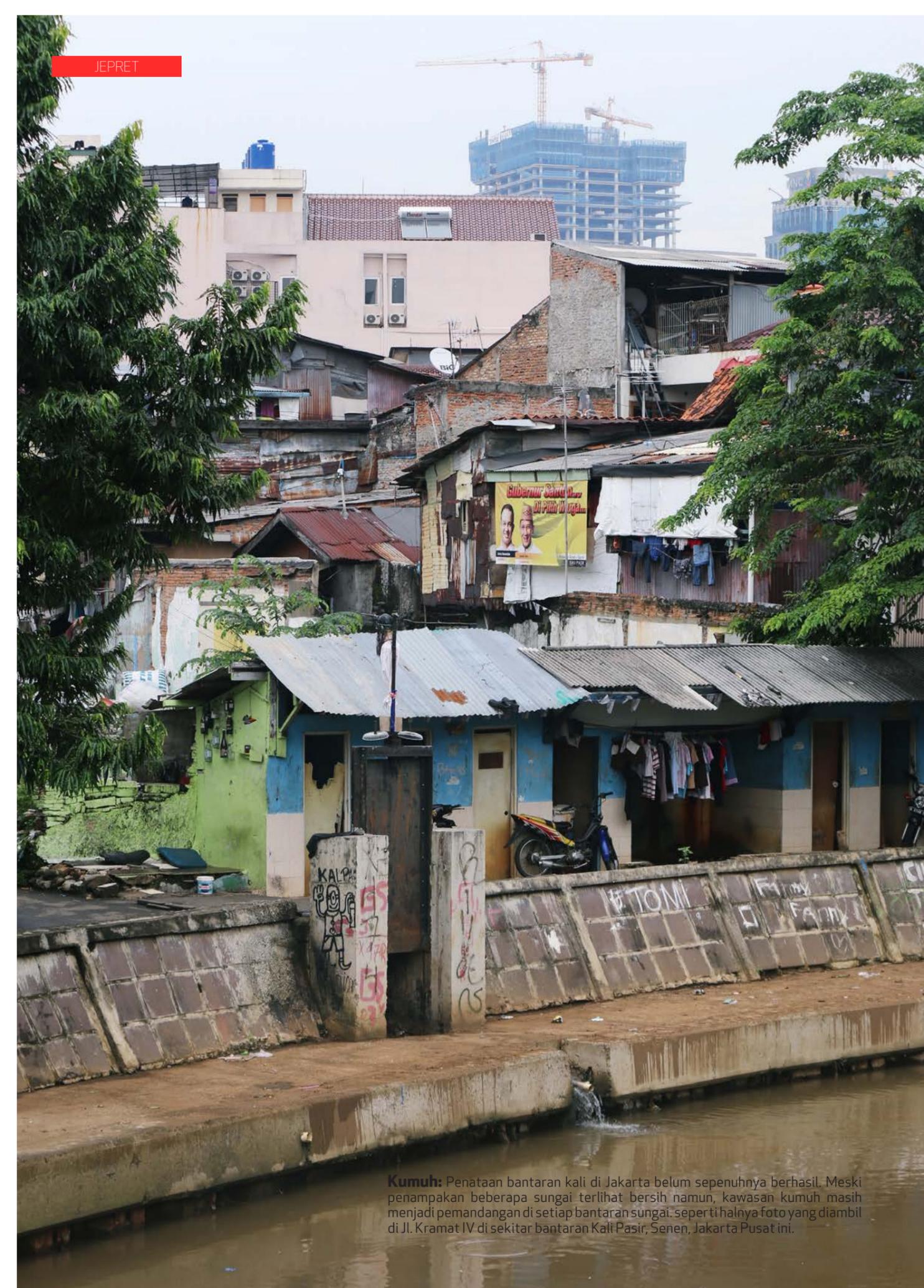
**Wawancara 14**

Memimpin Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bukan hal baru bagi Subiyono. Sejak beberapa tahun terakhir ia sudah menjabat sebagai Plt. Kapus Litbang tersebut.

LAPORAN UTAMA 16**WACANA HARI PENELITI NASIONAL**

Sejatinya profesi seorang peneliti merupakan jantung dari kemajuan dan inovasi suatu bangsa. Di negara-negara maju seperti Korea dan Jepang. Profesi peneliti sangat dihargai dan disegani oleh masyarakat setempat, karena peneliti dianggap sebagai ujung tombak kemajuan inovasi bangsa. Namun bagaimana apresiasi profesi peneliti di Indonesia? Sudah mampukah menjadi penentu kemajuan inovasi bangsa?





Kumuh: Penataan bantaran kali di Jakarta belum sepenuhnya berhasil. Meski penampakan beberapa sungai terlihat bersih namun, kawasan kumuh masih menjadi pemandangan di setiap bantaran sungai, seperti halnya foto yang diambil di Jl. Kramat IV di sekitar bantaran Kali Pasir, Senen, Jakarta Pusat ini.



Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menggelar Sosialisasi Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri, kepada seluruh BPP Daerah se-Indonesia di hotel Orchardz, Jakarta pada 7-8 September 2016. Acara ini juga sebagai bentuk Pemantapan Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di seluruh Indonesia

Secara resmi acara dibuka langsung oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Domoe Abdie. Dalam pidatonya Domoe mengatakan, lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya mempertahankan eksistensi BPP baik yang ada di pusat maupun yang ada di provinsi, atau kabupaten/kota.

Domoe meminta kepada para peserta yang hadir untuk menyamakan persepsi tentang arti penting pembentukan BPP sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri. "Keberadaan BPP Daerah cukup strategis dalam lingkup pemerintahan daerah. Khususnya dalam setiap program kelitbang. Selain itu, hadirnya Permendagri ini, merupakan salah satu terobosan dalam rangka mendongkrak stigma negatif tentang BPP. Permendagri juga tidak lain diarahkan untuk penataan organisasi perangkat daerah," ucap Domoe.

Ia pun berharap, setelah lahirnya PP tersebut, keberadaan BPP di daerah yang masih menginduk kepada Bappeda mulai dilakukan penyeragaman menjadi Badan mandiri dan terpisah dari Bappeda. tidak hanya itu, Terkait dengan banyaknya BPP daerah yang masih pro kontra terkait penilaian yang berimplikasi pada tipe sebuah Badan, Domoe berpesan, agar setiap BPP Daerah tidak perlu fokus terhadap tipe yang ditetapkan.

"Setelah terbit Permendagri ini, kita seragamkan. Tidak usah fokus pada tipe A, B atau C, yang penting eksis dulu dan berperan, sehingga BPP Daerah dapat berfungsi, berman-



BPP KEMENDAGRI GELAR SOSIALISASI PERMENDAGRI 17 TAHUN 2016

faat dan bisa didayagunakan oleh pimpinan di daerah, baik oleh gubernur, atau bupati/walikota," kata Domoe.

Hal itu juga dirasakan oleh berbagai peserta yang hadir, salah satunya dari Hendrik Rondunuwu, Kepala UPT Balai Litbang Provinsi Sulawesi Utara. "Adanya acara ini merupakan wujud komitmen Kemendagri sebagai induk BPP Daerah dalam memerhatikan penelitian daerah," terangnya saat diwawancarai usai acara.

Menurutnya, meski belum berdiri sebagai BPP Daerah, namun Balai Litbang Prov.Sulut dapat berkembang dan berdiri menjadi Balai Litbang berkat perjuangan BPP dalam menelurkan Permendagri tersebut. "Tadinya kami tidak ada berdiri sendiri, masih menempel dengan Bappeda. Jadi kita berharap hal semacam ini bisa terus

terlaksana, agar BPP Daerah tidak hilang arah saat mengadakan beragam program penelitian," paparnya.

Hal yang sama juga diamini oleh Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Barat, Yohanes Budiman. Dia menerangkan, sosialisasi semacam ini semakin menguatkan bahwa fungsi litbang di setiap daerah memang perlu didirikan. "Selama ini kita masih lemah dengan stigma litbang yang artinya 'sulit berkembang', adanya Permendagri No 17 Tahun 2016 ini fungsi litbang menjadi lebih jelas, terarah, dan terukur. Apalagi di daerah lebih mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kami berterimakasih sekali kepada BPP Kemendagri dengan adanya sosialisasi ini, dan berharap BPP terus ada dan dipertahankan di setiap daerah," tandasnya. (IFR)



SIKERJA TERAPKAN DISIPLIN DAN OUTPUT KERJA

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menyelenggarakan sosialisasi simulasi e-Sikerja, selama tiga hari berturut-turut dari Senin, 19 September hingga Rabu 21 September 2016 di Aula BPP Kemendagri

Sosialisasi hari pertama diikuti oleh para pejabat Kepala Pusat, Kepala Bidang, dan Bagian, serta para Kasubag dan Kasubid yang ada di lingkungan BPP Kemendagri. Acara dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Domoe Abdie, dan juga narasumber Cheka Virgowansyah, Kabag Jabatan Karier Setjen Kemendagri sebagai narasumber. Seluruh peserta yang berjumlah lebih dari 45 peserta tersebut nampak hadir dan mengikuti kegiatan dengan hikmat sambil membawa laptop dan komputer masing-masing.

Sikerja sendiri sebelumnya telah diperkenalkan sejak awal 2016 sebagai program tunjangan berbasis kinerja. Program tersebut semakin dimantapkan dan akan diterapkan secara efektif pada awal 2017 mendatang. Aplikasi Sikerja akan menentukan besaran kinerja setiap pejabat, besaran tunjangan pejabat tidak akan sama, karena sesuai disesuaikan dengan kinerja yang ia lakukan setiap hari.

Menurut Domoe Abdie, program tersebut merupakan satu kemajuan di lingkungan Kemendagri sebagai salah satu manifestasi dari disiplin kerja. "Di sini prestasi kerja menjadi penting, kedisiplinan akan terlihat secara nyata. Menjadi adil kalau tunjangan besar bagi pejabat dan pegawai yang disiplin," ucap Domoe.

Kepala Bagian Jabatan Karir Setjen Kemendagri, Cheka Virgowansyah juga menjelaskan., mulai 2017 pejabat Kemendagri sudah tidak bisa lagi datang terlambat atau bekerja sesuai dengan *output* yang dihasilkan. "Persentasenya adalah 50 persen kedisiplinan, dan 50 persen adalah *output* kerja sehari. Jadi apabila bapak/ibu datang terlambat satu menit saja, maka tunjangan akan dipotong sebesar satu persen, hal itu tidak dipengaruhi diganti atau tidaknya jam kerja," jelasnya.

Selain itu, agar para pejabat tidak lagi kaget dengan sistem penilaian kinerja baru, selama empat bulan terakhir Sikerja sudah diterapkan secara rutin oleh semua komponen Kemendagri. "Bapak-ibu nanti akan memasukan apa saja yang sudah dilakukan selama 5 setengah jam kerja, lalu atasan akan menilai, dan akan dihitung berapa jumlah Tunjangan Kinerja yang akan bapak-ibu terima, nanti akan terlihat," paparnya. (IFR)

MENDAGRI LANTIK 11 PEJABAT BPP KEMENDAGRI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Jumat siang hari resmi melantik sejumlah pejabat Kemendagri, tidak terkecuali BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri.

Terdapat 11 pejabat BPP yang resmi dilantik bersama 163 pejabat lainnya di seluruh komponen. Di antaranya, Yuddy Kuswanto yang menjadi Kabag Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Sistem Prosedur serta Evaluasi Kinerja ASN.

Selain itu, Pusat Otda dan Polpum melantik tiga Kabid, yakni Heriyandi Roni, sebagai Kabid Otonomi Daerah, Yohanes Sena Kabid Politik, dan Susanto Kabid Pemerintah Umum.

Pusat Inovasi Daerah memiliki tiga Kabid yang dilantik, yakni Teguh Narutomo sebagai Kabid SDM, Achmad Jani Rivai Yusuf Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dan Zaenal Arifin, Kabid Pengembangan Inovasi Daerah.

Mendagri juga melantik empat Kabid lainnya yang mengisi Pusat Litbang Adwil, Pempdes, dan Kependudukan, serta Pusat Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepada para penjabat yang baru di lantik, Mendagri berpesan agar seluruh pejabat dapat berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya, menjaga rahasia negara, dan tidak mencoreng nama lembaga dengan korupsi atau melanggar kode etik pejabat.

"lurus, semuanya sama-sama harus mempunyai komitmen dan melayani masyarakat dengan baik" tandas Tjahjo. (IFR)





BPP KEMENDAGRI TERUS SEMPURNAKAN DRAF RPP INOVASI DAERAH

JAKARTA – Sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan, BPP Kemendagri dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Peraturan Pemerintah mengenai Inovasi Daerah. Atas dasar itulah, BPP Kemendagri terus menyempurnakan draf RPP Inovasi Daerah yang akan diterapkan sebagai upaya memajukan inovasi di daerah.

Mengambil tempat di Hotel Millennium Jakarta pada 13-14 Oktober 2016, acara dilaksanakan dalam rangka pemantapan substansi RPP tentang Inovasi Daerah sebelum dilaksanakannya harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Acara tersebut juga terselenggara atas kerja sama BPP Kemendagri dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

Selama penyelenggaraan, Tim Penyusun RPP Inovasi Daerah menerima beberapa masukan dari pakar dan ahli. Salah satunya, Tri Widodo Deputy Inovasi Administrasi Negara dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang memberikan beberapa masukan terhadap draf RPP Inovasi Daerah. Selain Tri, hadir pula beberapa pakar dari lembaga yang sama seperti Abdul Muis dan Marsono. Selain dari LAN, pertemuan juga menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Tri mengapresiasi RPP Inovasi Daerah yang hampir final tersebut. Ia juga mengatakan, draf RPP Inovasi Daerah sudah mengungkap semangat melayani, ketimbang semangat mengatur. Namun, ia juga menyebutkan masih terdapat beberapa hal yang perlu dipertajam terkait draf RPP tersebut, misalnya mengenai tujuan dan sasaran inovasi daerah.

“Saya menyarankan tujuannya kembali ke UU Pemerintah Daerah sebagai meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi daerah. Sebaiknya takaran sasaran inovasi daerah lebih terukur. Pertama, meningkatkannya efektivitas dan efisiensi manajemen kerja

pemerintah daerah. Kedua, meningkatnya kualitas publik, dan ketiga meningkatnya aktivitas perekonomian,” paparnya.

Ia juga mempertajam pengaturan terkait kebijakan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah). Hal itu lantas langsung ditanggapi oleh Peneliti BPP, Hadi Supratikta yang mengatakan bahwa masuknya inovasi daerah ini ke RPJMD ini agar dapat menumbuhkan kembangkan inovasi daerah.

Sejatinya Hadi juga banyak setuju tentang beberapa masukan dari Tri, seperti masukan mengenai penataan unsur SIDA yang sebaiknya meliputi sumberdaya terlebih dahulu, jejaring, baru kemudian pelem-bagaan. “Jadi pada Pasal 9, saya menyarankan urutannya diubah. Lalu diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sumberdaya ini adalah anggaran, SDM, dan Pengetahuan. Jadi

komponen daerah tidak hanya menyangka penataan sumberdaya SIDA tidak hanya meliputi anggaran dan SDM, tetapi juga pengetahuan,” jelas Tri.

Mengenai sumber daya, Tri menyarankan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Menurutnya sumber daya harus terbagi lagi ke dalam beberapa poin, seperti anggaran, sdm, pengetahuan, praktik baik, serta dokumentasi terhadap praktik baik tersebut.

Insentif Daerah

Selain membahas mengenai tujuan dan tahapan-tahapan inovasi daerah, rapat tersebut juga membahas mengenai insentif bagi daerah yang berhasil melakukan inovasi. Kepala Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Rochayati Basra mengatakan, sebaiknya dalam rapat yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan itu juga menghasilkan kesepakatan mengenai insentif daerah bagi pelaku inovasi yang selama ini sudah lama diajukan beriringan dengan perancangan RPP Inovasi Daerah itu.

Heri Sudarmano, dari Kementerian Keuangan mengatakan, terkait insentif tersebut, peraturan kementerian keuangan sudah final, dan tidak bisa lagi menambahkan variable dalam nomenklatur terkait insentif yang akan diberikan kepada pelaku inovasi. Selain sudah final, dana dana tidak mungkin diberikan mengingat anggaran negara yang tengah mengalami defisit.

Namun, Heri memberikan solusi, insentif bisa diberikan oleh masing-masing K/L terkait. Kementerian keuangan, tambahnya, hanya bisa membantu melalui DID (Dana Insentif Daerah) yang dianggarkan setiap tahunnya, melalui beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah.

Indikator tersebut di antaranya kesehatan fiskal dan keuangan daerah, kinerja dan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan PU, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Menurutnya, mengenai insentif jelas sudah otomatis ada tanpa diatur lagi dalam RPP Inovasi Daerah.

“Sebagai contoh, ketika daerah melakukan inovasi dalam bidang keuangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, yang sesuai dengan beber-

apa indikator penilaian di atas, atau dengan inovasi, suatu daerah bisa meningkatkan kinerja ekonomi dan mengangkat kesejahteraan daerah. maka secara otomatis akan menambah penilaian daerah itu sendiri, sehingga DID bisa didapat lebih besar oleh suatu daerah,” jelas Heri.

Hal itu juga langsung ditanggapi dalam forum aktif tersebut, Tri kembali menyarankan agar BPP Kemendagri perlu berbicara lebih lanjut mengenai makna insentif yang diajukan ke Kemenkeu. “Kita perlu sepakati soal makna insentif. Selama ini kita terlalu fokus pada anggaran keuangan, padahal insentif juga bisa non finansial. Kalau DID sebenarnya sudah berjalan dan sudah ada kriteria. Saya kira insentifnya lebih kepada kepala SKPD ke pegawai. Misalnya diberi kesempatan mengikuti program pelatihan gelar dan non gelar, atau kenaikan pangkat dipercepat. Hal ini tentu bisa dilakukan tanpa diintegrasikan dengan DID nomenklatur baru. Contohnya Yogyakarta yang memberi inovasi pada SKPD yang berhasil melakukan inovasi. Nah bagi yang tidak melakukan inovasi tidak diberi tambahan insentif bahkan dikurangi. Jadi tidak ada penganggaran baru hanya mengalokasikan anggaran yang ada saja, tanpa membebani daerah maupun negara,” saran Tri.

Indikator Inovasi Daerah

Acara pemantapan substansi RPP Inovasi Daerah juga memaparkan model indikator pengukuran indeks inovasi daerah. Materi disampaikan oleh Marsono dari LAN. Ia memaparkan model pengukuran yang digunakan oleh LAN dalam menilai indeks inovasi di suatu daerah.

Marsono mengatakan, pengukuran indeks yang sudah dikonsepsi oleh pihaknya mengacu pada benchmark model-model pengukuran indeks yang ada di seluruh Dunia. Sehingga sangat relevan untuk diterapkan. Namun, menurutnya, pengukuran tersebut jauh dari sempurna, perlu pemantapan dan diskusi lebih lanjut, jika nantinya digunakan dalam RPP Inovasi Daerah yang tengah disusun.

“Pengukuran tersebut sudah sangat valid, dan lebih mudah. Yang tidak terlalu relevan dan rigid itu kita tinggalkan. Kita hanya mengambil yang pokoknya saja. Parameter penilaian inovasi daerah, seluruh indikator ada parameter dari mulai input-pros-

es-output-outcome, dan tentu saja perlu disiskusikan sesuai kebutuhan PP,” kata Marsono.

Marsono menambahkan pengukuran tersebut lebih kepada kajian LAN dengan mengutamakan problem solving, yang berawal dari idealisme LAN untuk menentukan indeks inovasi daerah. Pengukuran tersebut juga memuat konsep triple helix, namun tidak secara luas dan hanya dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengukuran yang dipaparkan dalam kesempatan tersebut juga pernah diujicobakan di beberapa kota di Indonesia, seperti di Blitar dan Pontianak. Penilaian juga dilakukan dengan tidak sembarangan dan secara objektif.

“Namun, penilaian tersebut terdapat beberapa kelemahan, sebagai contoh ketika dilakukan penilaian kepada para SKPD dan kepala dinas yang ada di Blitar, Jawa Timur, mereka tidak berani menilai pimpinan. Tetapi setelah dijelaskan mereka baru mau melakukan,” tukas Marsono.

Catatan KOMPAK

Terhadap draft RPP yang disusun, KOMPAK selaku lembaga yang memfasilitasi kegiatan tersebut memberikan beberapa catatan sebagai masukan yang diharapkan bisa memperkaya draft RPP tersebut. Direktur KOMPAK Bachtiar mengatakan, beberapa catatan tersebut di antaranya, yang terdapat dalam pasal 10 dan 30 terkait sistem informasi inovasi daerah. ia juga mempertanyakan seandainya terdapat sistem yang sama pada kementerian dan lembaga.

Selain itu, KOMPAK juga mempertanyakan konsistensi pada BAB 4 yang kemudian berubah menjadi usulan inovasi daerah pada pasal 11, yang sebelumnya dari pasal 1 tidak menggunakan kata ‘usulan’. Kompak juga menyoroti perlindungan hukum yang menurutnya, apa yang dikatakan Tri Widodo perlu dipertimbangkan, yakni tidak merugikan negara, penyelenggaraan wewenang, dan tidak adanya niat jahat.

“Kalau hanya dua pasal ini tidak akan terlalu melindungi. Selalu ditekankan perlindungan, kalau hanya seperti ini, dibacanya beda,” tegas Bachtiar. (IFR/MSR)

RPP INOVASI DAERAH BICARA SIDA (SISTEM INOVASI DAERAH)

Strategic meeting yang dilakukan BPP Kemendagri bersama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) mengambil tema pemantapan substansi RPP tentang Inovasi Daerah sebelum dilaksanakannya harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta (14/10).

RPP Inovasi Daerah, meski sudah pada tahap pemantapan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perbaikan dengan beberapa saran dan masukan dari para pakar. Salah satu yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai perlu atau tidaknya RPP Inovasi Daerah membahas SIDA (Sistem Inovasi Daerah).

Adanya SIDA dalam RPP Inovasi Daerah sebenarnya memiliki tujuan baik. Siti Aminah, Tim Penyusun mengatakan, semangat mengatur SIDA berangkat dari Peraturan Bersama (Perber) Menristekdikti bersama Mendagri mengenai Penguatan Sistem Inovasi Daerah pada 2014. Selain itu, menurutnya pengaturan Sida juga dilatarbelakangi oleh kondisi empirik keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah. Dengan SIDA juga, tambah Siti, RPP tersebut akan mengatur setiap inovasi yang tidak hanya non teknologi tetapi inovasi dalam bentuk teknologi sebagaimana yang dilakukan oleh LIPI, BPPT, dan lembaga pemerintahan lainnya.

“Selain itu, peran inovator bisa dikembangkan juga dalam konteks triple helix ke dalam quintuple helix. Mendorong akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat ikut membangun kesejahteraan,” ucap Siti

Teguh Narutomo, tim perumus lainnya, mengatakan hal yang sama, ia sepakat, SIDA perlu diatur dalam RPP, pasalnya saat ini, yang sering

terjadi banyak inovasi yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan tidak pernah ada aturan khusus. Ia menegaskan aturan SIDA juga sebagai bentuk perintah Presiden Joko Widodo yang mengatakan negara harus hadir pada masyarakat bawah, serta terus mendorong inovasi, atas dasar itulah SIDA perlu diatur.

Selain Teguh dan Siti, Imam Radianto, Kasubag Hukum dan Perundang-undangan menyebutkan banyak inovasi di daerah berdiri sendiri tanpa aturan, melalui sebuah sistem nantinya inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing di daerah.

Menurut Imam, penemuan (inovasi) berbeda dengan inovasi.

“Inovasi lebih ke tata cara, Thomas Alpha Edison itu inventor, bukan inovator. Inovasi bisa jadi inovasi ketika ada cara-cara baru yang benar dan menghasilkan nilai manfaat setelah digunakan melalui tahapan-tahapan yang sudah dilalui,” tutur Imam.

Imam menambahkan banyak inovasi di daerah tanpa menggunakan sebuah sistem. Ia mencontohkan beberapa peraturan penguatan SIDA yang sudah termasuk dalam dokumen perencanaan pembangunan pemer-

intah daerah sering tanpa koordinasi. “Contohnya inovasi di Sumatera Utara yang memiliki pusat penelitian kelapa sawit. UKM di sana dikelola oleh perguruan tinggi, dan mereka berinteraksi selama lebih dari tiga tahun bersama pemerintah. Namun hasil penelitian menyebutkan adanya titik lemah, yaitu pada tahap koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha, titik lemah tersebut berupa anggaran. Maka adanya SIDA menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya saing” kata Imam.

Berbeda dengan ketiga tim penyusun di atas, Khalilul Khairi, salah satu Pakar dari IPDN mengatakan, RPP Inovasi Daerah yang tengah disusun memiliki batasan. Menurutnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur Inovasi Daerah tidak bermaksud mengatur SIDA secara detail. “UU 23 yang dimaksud tidak sedang mendorong industri agar berkembang lebih maju, kelapa sawit tumbuh banyak, dan sebagainya. Tidak mengatur bagaimana hasil pertanian bisa bertambah banyak dengan inovasi. Perintah atas PP tersebut hanya mengenai inovasi penyelenggaraan daerah.” Ujar Khalilul.

Khalilul menerangkan, dalam mer-

“Substansi SIDA perlu diakomodasi dalam PP Inovasi Daerah guna efektifnya pencapaian tujuan pengaturan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2014”

Domoe Abdie
(Plt. Kepala BPP Kemendagri)



ancang PP perlu dilakukan simulasi yang tidak hanya yang terlihat secara empirik, tetapi butuh sinkronisasi dengan banyak hal. “Contohnya Inovasi di bidang manajemen internal. Pengelolaan arsip dari yang awalnya manual menjadi online. Itulah inovasi, ada proses layanan, produk layanan dan bisnis proses didalamnya,” terang Khalilul.

Namun demikian, keberadaan SIDA merupakan salah satu cikal bakal lahirnya pengaturan inovasi daerah dalam UU No 23 Tahun 2014, yang juga telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Menurut Plt. Kepala BPP Kemendagri Domoe Abdie, substansi SIDA perlu diakomodasi dalam PP Inovasi Daerah guna efektifnya pencapaian tujuan pengaturan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut. (MSR)

BPP KEMENDAGRI SELENGGARAKAN SEMINAR KAJIAN KOMPETITIF 2016

Seminar kajian Kompetitif 2016, yang digelar Kemendagri menampilkan delapan panelis yang memaparkan hasil penelitiannya selama sebulan terakhir. Penelitian tersebut diharapkan bisa menghasilkan sebuah rekomendasi yang akan digunakan sebagai kebijakan pemerintah dalam negeri. Seminar dilaksanakan di Aula BPP Kemendagri, Rabu (20/10).

Delapan panelis tersebut adalah Imam Radianto Anwar Setia Putra dengan judul penelitian Interaksi Antar Aktor Dalam Inovasi Daerah. Penelitian tersebut mengambil lokasi di Sumatera Utara. Dalam paparannya imam mengatakan, kurangnya koordinasi antara pelaku inovasi di daerah. Imam pun memabagi ke dalam tiga kategori koordinasi yaitu baik, sedang, dan buruk.

Selain itu penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Inovasi Daerah disampaikan oleh Hotnir Sipahutar dengan lokasi penelitian di Kota Magelang. Kemudian Hasoloan Nadeak dengan bahasan cakupan kepemilikan akta kelahiran, selanjutnya Amsal dengan membahas penyelesaian aset daerah di Kota Jambi, Joko Sulistyio dengan judul Peran Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Daerah Perbatasan antar Negara dengan lokasi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Siti Aminah judul penelitian Pengaruh Pembelajaran/Pelatihan terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Mercy Pasande, Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Penerapan *City Branding*, dengan lokasi di Provinsi DIY dan Kota Bandung, serta Ray Septianis Kartika dengan penelitian Penataan Data Inovasi Daerah, lokasi kajian di Provinsi DIY, dan Jawa Timur.

Namun terkait pemaparan hasil penelitian tersebut, R N Afsdy Saksano, Tim Penilai memiliki pandangan berbeda. Salah satunya terkait rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan atau dasar pemikiran penelitian tersebut. Kemudian Saksano menambahkan, kesimpulan belum menjawab masalah yang menjadi fokus kajian pe-

nelitian.

“Harus kembali pada keingintahuan peneliti yang dituangkan dalam kesimpulan. Kemudian rekomendasi harus berbasis temuan, serta kesimpulan harus mengarah pada perbaikan kualitas penelitian, dan rekomendasi kebijakan,” ucap Saksano.

Selain itu, terkait kegiatan tersebut Plt. Kepala BPP Kemendagri Domoe Abdie berharap, para peneliti agar segera memperbaiki sesuai yang telah direkomendasikan oleh Tim Penilai. Domoe Juga berharap secepatnya ada perbaikan agar bisa secepatnya pula disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia juga mengapresiasi beberapa pemaparan yang menjadi hasil penelitian dari para peneliti.

“Tolong kajian diperbaiki sesuai rekomendasi penilai, dan berikan yang terbaik. Saya berikan waktu untuk memperbaiki selama satu minggu, untuk kemudiandisampaikan kepada Mendagri. Selebihnya saya mengapresiasi peneliti yang sudah memaparkan dengan sangat bagus hasil penelitiannya,” kata Domoe. (MSR)



SUBIYONO,
KAPUS ADWIL, PEMDES, DAN KEPENDUDUKAN



Membangun Budaya Sehat Penelitian dan Pengembangan

Memimpin Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bukan hal baru bagi Subiyono. Sejak beberapa tahun terakhir ia sudah menjabat sebagai Plt. Kapus Litbang tersebut.

Setelah ditetapkan menjadi Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan melalui jalur seleksi Aparatur Sipil Negara, Subiyono semakin mantap dengan tujuan meningkatkan kontribusi BPP Kemendagri sebagai lembaga yang berdaya guna dan bisa disejajarkan dengan komponen Kemendagri lainnya.

Kepada Tim Media BPP, dalam sela-sela acara keakraban penyambutan setelah dikukuhkan sebagai pejabat eselon II, Kepala Pusat Litbang di

BPP Kemendagri, Subiyono mengatakan, bersama jajarannya akan menata ulang sekaligus meningkatkan *output* hasil-hasil kelitbangannya di Puslitbang yang dipimpinnya, terutama terkait dengan kontribusinya dalam memebrikan solusi terhadap berbagai permasalahan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan.

Tanggapan Anda sebagai pejabat yang dilantik berdasarkan jalur seleksi ASN

Pertama, Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kembali memimpin Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan BPP Kemendagri. Dengan begitu saya bisa fokus melanjutkan program yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama, yang tidak lain untuk

mengangkat citra BPP Kemendagri itu sendiri.

Kedua, melalui jalur seleksi ASN, paling tidak saya bisa membuktikan bahwa saya mendapat jabatan ini karena proses seleksi yang cukup panjang, melalui tahapan sebagai pelaksana tugas yang hampir satu setengah tahun ditambah masih dengan proses seleksi ASN serta dukungan banyak pihak tentunya. Sebagai informasi yang ikut seleksi ASN di jabatan ini juga tidak sedikit pula, ada 18 orang pelamar. Hal itu menunjukkan bahwa minat menduduki jabatan di litbang sekarang juga semakin banyak.

Visi misi setelah menjadi Kepala Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan

Visi kami membangun budaya sehat tentang penelitian dan pengembangan

(litbang) dengan merubah paradigma (*paradigm shift*) *stakeholders* untuk memposisikan litbang sebagai penjuru (*center*) sekaligus dasar bagi proses dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah (pemda), terutama dalam bidang administrai kewilayahan, pemerintahan desa dan kependudukan. Sedang misi kami melakukan penelitian dan pengembangan yang lebih inovatif, strategis dan aktual yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan Kemendagri dan pemda, syukur-syukur langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Program yang sudah terealisasi pada tahun lalu

SPuslitbang kami telah melakukan beberapa penelitian/kajian penting. Di bidang kependudukan, kita telah melakukan penelitian/kajian tentang Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan, Persoalan Data Penduduk, terutama terkait dengan DP4 dan DPT, Pemanfaatan Data Penduduk, dan lain-lain.

Di bidang pemerintahan desa, melakukan penelitian/kajian tentang Perselisihan Batas Desa di Halmahera Barat (Halbar) dan Halmahera Utara (Halut), Implementasi Dalam Pengelolaan Dana Desa, dan yang sedang berlangsung tentang Penataan Desa.

Di bidang administrasi kewilayahan, melakukan penelitian/kajian tentang Tumpang Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Kota Batam dan yang sedang berlangsung penelitian/kajian tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus, dan sebagainya.

Program Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan di tahun yang akan datang

Pada tahun yang akan datang (2017), salah satu yang sudah masuk dalam program prioritas nasional, kita akan membuat pilot proyek model inovasi pelayanan pengurusan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran) di tiga provinsi. Maksudnya untuk mencari model inovasi terbaik pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan di beberapa daerah di Indonesia.

Hasil pilot proyek tersebut, yaitu model inovasi terbaik nantinya akan direkomendasikan untuk direplikasikan di daerah lain. Disamping itu melakukan penelitian/kajian terkait dengan isu aktual yang terkait dengan berbagai persoalan dalam implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No 6 Tahun 2013 tentang Desa dan dan UU No 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Nama:

Subiyono, SH., M.Sc., Ph.D.

Tempat/Tgl. Lahir:

Klaten / 17 Februari 1961

Pendidikan:

PhD (Doctor of Philosophy in International Health), Graduate School of International Health, University of Tokyo Japan (March 1999)

M.Sc. (Master of Economic and Social Studies in Population Policies and Programs), University of Wales College of Cardiff (UWCC), United Kingdom (March 1995)

Professional Development Courses

Strengthening Indonesian Research Capacity to Enhance National Programs and Evaluations, University of the Sunshine Coast, Australia (2014); The Advance Health Leadership Forum (AHLF). School of Public Health, University of California, Baekeley, USA and Centre De Recdrca en Economia Salut (CRES), University of Pompeu Fabra, Barcelona, Spain (2006);

Peace Through Development- Comparative Study to Cambodia, UNDP-Indonesia – National Development Planning Agency Republic of Indonesia. Cambodia (2006);

The Training Course on Population Dynamics and Policy in Indonesia. Graduate Studies in Demography. The Australian National University. Australia (2003);

APEC Study Center Conference: IT and Regional Economic Integration in Asia, The Hong Kong APEC Study Center of the Hong Kong Polytechnic University Hong Kong America Center, Hong Kong, Shenzhen-China (2002);

32nd, Summer Seminar on Population. Population Aging in Asia and the Pacific: The Challenge for Healthcare Systems. The East West Center, University of Hawaii, Honolulu-Hawaii-USA (2001);

Short-term Course on Aging. Studies of Economics and Financial Aspects of Aging in Developing Countries. The International Institute on Aging. United Nations. Malta-Europe (2000).

Pengalaman Pekerjaan

Kemendagri: 2002 - sekarang;

Badan Kependudukan Nasional (BAKNAS): 2001 – 2002;

Kementerian Negara Transmigrasi dan Kependudukan: 2000

Kementerian Negara Kependudukan / BKKBN: 1999

BKKBN Provinsi Jawa Tengah: 1985-1999



LAPORAN UTAMA

MEWACANAKAN HARI PENELITI NASIONAL



mitra lain, diberi suntikan dana. Selain itu, di sana kebanyakan penelitiannya merangkap di jabatan posisi struktural terpenting. Sehingga mereka paham bagaimana kebutuhan peneliti, dan memberi dorongan penuh terhadap kinerja peneliti. Banyak kegiatan-kegiatan yang sangat berkreasi, meski anggarannya kecil tapi mereka cukup sibuk dan publikasinya luar biasa,” terangnya.

Untuk itu Hadi juga menyarankan, BPP Kemendagri dapat meniru beberapa manajemen Litbang K/L yang sudah maju, dengan ditambah komitmen tinggi serta sinergitas antara peneliti dan pejabat struktural. “Kalau di BPP Kemendagri sebenarnya SDM-nya sudah bagus, tinggal membangun komitmen ke dalam, dan memanfaatkan SDM yang ada dengan begitu dapat sejajar dengan Litbang yang sudah maju,” ucap pria yang juga bekerja di BPP Kemendagri itu.

Sekedar informasi, Himpenindo merupakan organisasi yang terdiri dari kumpulan para peneliti seluruh Indonesia. Ia lahir atas prakarsa seluruh peneliti di 34 Kementerian dan beberapa Lembaga untuk memberi wadah bagi peneliti agar dapat berintegritas penuh dalam kariernya. Organisasi yang dideklarasikan tiga tahun lalu ini cukup solid dalam memayungi aspirasi peneliti. Mereka mempunyai beberapa anggota dari setiap K/L. Salah satunya ada Hadi Supratikta yang merupakan peneliti perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pendidikan untuk Peneliti

Selain masalah fasilitas dan manajemen, mereka juga kerap mempertanyakan bagaimana pendidikan peneliti berlangsung. Seperti yang sudah-sudah, menurut Nadeak dan Rosmawaty, proses pelatihan pendidikan atau diklat peneliti, kebanyakan tidak sesuai dengan kepakaran. Misalnya diklat dilakukan beberapa hari dengan narasumber dari LIPI yang notabennya adalah saintifik. Mereka cenderung memberikan pelatihan bagaimana metode penyusunan laporan peneliti, apa saja bagan-bagan yang harus dibentuk, menghitung hasil penelitian dengan cara kuantitatif, jenis-jenis metodologi penelitian, dan sebagainya. “Kalau semacam itu, kita juga pernah mendapatkan hal itu

semasa kuliah,” kata Nadeak.

Pelatihan atau diklat yang diharapkan Nadeak, Ros, dan juga beberapa peneliti lainnya, ialah seperti pelatihan Menulis Karya Ilmiah yang pernah dilaksanakan oleh Sub Bagian Perpustakaan BPP Kemendagri yang bekerjasama dengan Tempo Institute dan KSI (Knowledge Sector Initiative) pada beberapa bulan lalu di Bogor.

“Jadi kami lebih ke praktik langsung menulis ilmiah. Masalah kami bagaimana memulai menulis, bukan merancang laporan. Misal kayak pelatihan di Bogor kemarin, kami diajarkan bagaimana menyusun kalimat. Kami jadi dapat ilmu baru, bagaimana penulisan struktur di paragraph satu dan dua tulislah latar belakang terlebih dahulu, baru kemudian di paragraf tiga sudah masuk pemikiran si penulis. Jadi enak



“Kulturnya harus pada berbasis riset bukan pada berbasis birokrasi. Untuk itu, sejak awal rekrutmentnya harus diubah. Harus benar-benar peneliti, bukan dari pejabat yang mau pensiun,

lebih ke praktik,” tambahnya.

Ros juga menambahkan, selama ini tidak ada pelatihan penulisan laporan hasil penelitian yang bermanfaat, selain pelatihan di Bogor kemarin. “Selama ini kami diklat ya hanya pelatihan biasa tanpa mendapatkan ilmu baru yang bisa kami terapkan, berbeda dengan pelatihan di Bogor lalu. Nah, ke depannya kami harap peneliti di Litbang ini bisa mendapatkan pelatihan semacam itu, jadi kami bisa praktik langsung,” tuturnya.

Agar lebih bagus lagi dalam mencetak SDM yang berkualitas, Nadeak juga menyarankan agar para peneliti dapat disekolahkan kembali atau minimal bekerja sama dengan lembaga lain. Misal, peneliti Kemendagri yang fokus kajiannya pada kebijakan pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi seperti di UI atau UGM. Di sana, menurutnya sangat relevan dengan bidang peneliti di BPP Kemendagri. “Ada kajian keuangan

dan kebijakan politik pemerintahan di sana yang bisa diikuti oleh peneliti BPP Kemendagri. Kalau saya lihat Diklat Peneliti selama ini hanya menghabiskan anggaran saja. Pengajarnya tidak sesuai dengan bidang kita di kebijakan,” jelasnya.

Setelah mendapatkan haknya, Nadeak juga sadar akan keberlangsungan jangka panjang setelah ada perbaikan diklat peneliti tersebut. Beberapa peneliti lainnya diharapkan setelah itu, ada konsistensi dalam produktivitas penulis. “Selain itu, mereka ya harus lah konsisten dengan apa yang mereka dapat. Produktif menulis. Coba tengok, setelah pelatihan di Bogor kemarin, berapa orang peneliti yang masih aktif menulis? Nah, keberlangsungan ini saya rasa penting ya, mereka bisa magang di tempat-tempat yang memaksa mereka untuk terus menulis. Atau

mungkin Kepala Badan bisa memberi punishment pada mereka yang tidak aktif menulis,” sarannya.

Masalah Anggaran Tak Pernah Selesai

Sudah menjadi pembicaraan umum, jika anggaran peneliti Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Beberapa peneliti yang kami wawancarai pun sepakat, anggaran 0,9 persen dari PDB itu tentu saja tidak cukup untuk menunjang penelitian mereka. Ada yang menjerit tidak cukup, ada juga yang pasrah dengan anggaran yang terbatas. Seperti yang terjadi di Pusat Litbang Kementerian Sosial.

Menurut Agus Purwanto, Peneliti Puslitbang Kemensos mengatakan anggaran di Kementerannya sebenarnya tidak cukup untuk melakukan penelitian sosial yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Misalnya penelitian mengenai tingkat daerah kemiskinan,

itu perlu wawancara banyak orang. Tapi cukup tidak cukup, ya harus dicukup-cukupi. Caranya bagaimana? Kami kurangi anggaran dari program non prioritas, kami dahulukan program prioritas,” terangnya.

Pihaknya mengaku, Kemensos selalu memunyai capaian hasil target penelitian yang telah dilaksanakan sebagai hasil rekomendasi kebijakan Kementerian Sosial. “Saya rasa semua K/L sama, hanya saja mereka harus pintar-pintar mengatur POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) masing-masing, supaya anggaran yang kecil bisa cukup meng-cover semua kegiatan,” terangnya.

Namun, saat ditanyakan kepada Nadeak, anggaran di BPP Kemendagri ini sebenarnya sudah sangat cukup besar, namun prosesnya penggunaannya yang terlalu panjang dan tidak banyak bermanfaat. “Menurut saya sudah cukup besar, namun proses penggunaannya terlalu panjang, berbelit-belit dan tidak bermanfaat. Misalnya, sebuah penelitian A, rapatnya bisa sampai panjang, ada diskusi terbatas lah, FDA (Forum Diskusi Aktual) lah. Menurut saya ini tidak perlu, langsung saja ke pembahasan, tidak perlu rapat penyusunan yang terlalu banyak menghabiskan anggaran. Inilah yang membuat serapan anggaran begitu besar. Besok 2017 akan ada anggaran 1,1 miliar saya rasa sudah cukup dan semestinya harus lebih baik lagi dalam pengelolaannya,” sarannya.

Keterbatasan anggaran justru dirasakan Nadeak manakala, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) peneliti justru dialihkan oleh pihak sekretariat. Misal ada anggaran penelitian yang dilaksanakan oleh unsur staf. “Seringkali seperti itu. Program peneliti tapi yang melaksanakan bukan peneliti, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, seperti evaluasi, dsb,” jelasnya.

Pada Waktu yang akan datang, dia berharap masalah anggaran ini bisa disenerikan antara pejabat sekretariat dengan peneliti.

Apa Kata Kepala Peneliti LIPI?

Berbagai permasalahan itu, kami coba telusuri pada orang-orang di luar lingkaran, yakni dari pihak peneliti non Kementerian. Kami mencoba meminta pendapat dan kacamata mereka melihat berbagai permasalahan penelitian di Litbang. Tim Media BPP lantas menghubungi Syamsudin Haris, Kepala Peneliti



LIPI di tengah kesibukannya. Ada beberapa masukan menurutnya yang harus diubah oleh para peneliti dan pejabat di Litbang Kementerian. “Secara umum kinerja peneliti itu tergantung dua hal, yakni di mana ia bekerja dan bidang keahlian apa yang dikerjakan,” ungkapnya membuka percakapan.

Tentu saja, peneliti di LPNK (Lembaga Penelitian Non Kementerian) terlihat lebih maju, produktif, dan mandiri daripada peneliti di Litbang Kementerian. Bukan terkesan untuk menjatuhkan atau membandingkan, namun peneliti senior yang akrab disapa Haris ini mengatakan, biasanya peneliti di Litbang masih dipersepsikan sebagai tempat buangan. “Tentu berbeda K/L dengan LPNK. Meskipun saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara kuantitatif mana kerjanya yang lebih bagus. Tapi biasanya litbang di kementerian sampai saat ini masih dipersepsikan sebagai tempat buangan, atau tempat bagi pegawai senior yang ingin memperpanjang masa pensiunnya,” tandasnya.

Ia mencontohkan, umumnya di semua Kementerian pejabat yang menjelang usia 60 tahun, memperpanjang usia pensiunnya menjadi peneliti di Litbang Kementerian, dengan begitu masa pensiunnya ditambah lima tahun lagi. Berbeda dengan LPNK yang lebih otonom dan independen. Mereka memang sejak awal mewedahi peneliti sesuai dengan kepakaran masing-masing dan minatnya terhadap dunia peneliti. Seperti LAPAN, LIPI yang SDM utamanya memang difungsikan secara maksimal untuk penelitian, sehingga proses yang dihasilkannya

berkualitas dan terpakai.

“Riset di Kementerian belum tentu terpakai oleh Kementerian masing-masing. Jadi sangat disayangkan. Sudah dibiayai negara untuk mem-back-up perumusan kebijakan dari Kementerian. Tapi tidak terpakai, kan sayang sekali,” imbuhnya.

Haris menyarankan jika lembaga Litbang keberadaannya ingin tetap dipertahankan oleh pemerintah, eksis, dan dapat menghilangkan stigma ‘Sulit Berkembang’, mereka harus mengubah mindset dan mencabut akar kultur rezim yang berantakan. Harus diubah kulturnya. “Kulturnya harus pada berbasis riset bukan pada berbasis birokrasi. Untuk itu, sejak awal rekrutment nya harus diubah. Harus benar-benar peneliti, bukan dari pejabat yang mau pensiun,” terangnya.

Hariz juga menyinggung mengenai dana penelitian yang terkesan kecil dan terbatas, sehingga memengaruhi kinerja peneliti. “Kalau dari segi anggaran, memang anggaran kita masih kecil, masih kalah dengan Singapura, Korea atau Jepang. Padahal anggaran ini sangat mempengaruhi kinerja peneliti. Anggaran ini menyangkut komitmen negara terhadap riset. Semakin maju riset suatu negara, semakin maju pertumbuhan pengetahuan dan ekonomi suatu negara. Sehingga para peneliti itu juga perlu didukung penelitian dan

insentifnya,” sarannya menutup perbincangan. (IFR)



PENELITI BUTUH HARI PENELITI

Beragam persoalan yang dialami peneliti Indonesia, khususnya peneliti di Litbang Kementerian, menyudutkan sebuah tuntutan dan kepastian akan kesejahteraan peneliti. Bagaimanapun, peneliti membutuhkan tempat, waktu, dukungan sarana prasana, biaya penelitian yang optimal, dan kemampuan mengembangkan pengetahuannya melalui pelatihan atau pendidikan. Sebagai tombak kemajuan suatu bangsa, negara berkomitmen mendukung penuh penelitian Indonesia. Tidak terkesan mati suri apalagi terus melekat istilah 'sulit berkembang'.

Data LIPI menunjukkan, hasil penelitian Indonesia yang dituangkan dalam jurnal tiap tahun ada sekira 7.000 jurnal, namun hanya ada 300 jurnal yang terakreditasi di seluruh Indonesia. Itu artinya hanya 4,3 persen jurnal di Indonesia yang telah terakreditasi. Menurut **Wahid Nashihuddin**, Manajer Layanan Perpustakaan PDII – LIPI, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, yakni masalah manajemen pengelolaan yang kurang maksimal, masalah kesulitan penulisan (pendidikan), dan anggaran dalam mendukung jurnal (honor penulis atau mitra bestari).

LIPI juga mencatat, jumlah hak paten yang diajukan Warga Negara Indonesia (WNI) sebenarnya cukup mengalami peningkatan, yakni meliputi 24 paten (2005), 33 paten (2006), 20 paten (2007), 219 paten (2008), 102 paten (2009), dan 115 paten (2010). Namun dari beberapa pengajuan tersebut, peneliti harus bersabar mengikuti proses panjang yang berbelit-belit agar mendapatkan HAKI (Hak Akan Kekayaan Intelektualnya tersebut).

Para peneliti Indonesia bahkan bisa mencapai 11 tahun dalam mengurus Hak Patennya. Padahal, paten merupakan pengakuan atas keberhasilan peneliti melakukan riset. Seperti yang dialami Bambang Subiyanto. Dalam keterangan LIPI menjelaskan, dia harus berusaha 11 tahun untuk mengurus temuan bambu kompositnya yang sejak 2000-2011 mengurusnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Peneliti senior pada Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Herliyani Suharta. Ia mengajukan paten kompor tenaga surya selama 10 tahun sejak 1998 hingga 2008 baru dikeluarkan.

Kepala Peneliti LIPI, **Syamsuddin Haris** juga sebenarnya sangat menyesalkan peran pemerintah dalam mendukung kemajuan riset inovasi bangsa yang terkesan setengah-setengah tersebut. Meskipun sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan lamanya proses



paten dan penerbitan jurnal. Seperti faktor banyaknya pemohon paten yang tidak menyusun hasil penelitian sesuai format penulisan spesifikasi permohonan. “Nah seharusnya kan rendahnya akurasi dalam pengajuan paten tidak bisa dijadikan alasan lamanya pengurusan paten. Semestinya ada konsultan paten yang mengarahkan. Selain itu, persoalan royalti atau

pembayaran atas penggunaan hak paten dari hasil inovasi para periset tidak diatur dengan jelas. Padahal LIPI sudah mendesak Kementerian Keuangan untuk mengatur hal tersebut,” paparnya.

Wadah peneliti

Untuk itu, melihat kondisi ketidakjelasan nasib peneliti dan kesejahteraannya akan wadah hasil-hasil penelitiannya.

Peneliti membutuhkan wadah untuk tempat berinspirasi menunjukkan kemampuannya dalam bidang riset dan pengembangan. BPP Kemendagri sendiri melihat, peneliti perlu dihargai, membangun jati dirinya dalam bentuk peringatan hari khusus Hari Peneliti Nasional. Usul wacana ini disampaikan langsung dari pemikiran Plt. Kepala BPP Kemendagri, Domoe

Abdie yang melihat berbagai fenomena peneliti yang sangat jauh dari kata ‘layak sejahtera’. Domoe menghimbau agar Hari Peneliti Nasional tersebut dapat didukung oleh semua elemen peneliti untuk menyatukan suara, mengeratkan tangan membahas wacana tersebut.

Tim Media BPP mendatangi beberapa peneliti di BPP Kemendagri dan

mewawancarai sejumlah elemen terkait dari Kementerian dan Lembaga. Mereka semuanya sepakat dengan pengusulan dari Kepala BPP. Bahkan ada yang sudah memikirkan bagaimana konsep dan perencanaan hari tersebut. Seperti yang dikatakan oleh **Hassoloan Nadeak**, peneliti senior BPP Kemendagri. Ia mengatakan, wacana Hari Peneliti Nasional merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peneliti yang selama ini dirindukan.

“Kalau ada hari peneliti itu berarti peneliti dianggap penting oleh pemerintah. Penting dari sisi apa? Dari kegiatan itu sendiri. Nantinya saya harap ada banyak hal-hal yang diambil dari hasil penelitian yang bisa mengisi Hari Peneliti tersebut. Ada wadah untuk hasil penelitian, karena selama ini saya melihat wadah untuk peneliti masih sangat kurang. Banyak peneliti Indonesia yang berprestasi tapi justru bekerja untuk luar negeri, karena kurangnya dukungan dan wadah dari pemerintah,” jelasnya.

Hal itu juga diamini oleh **Rosmawaty Sidauruk** yang juga merupakan peneliti senior BPP Kemendagri. Perempuan berdarah Batak yang akrab disapa Ros ini mengatakan, selama ini sebenarnya lembaga yang dinaunginya memang seringkali mengalami pasang surut idealisme. Sehingga ia kerap mempertanyakan adanya komitmen pemerintah dalam memajukan penelitian, khususnya soal kebutuhan peneliti di Litbang Kementerian. “Saya sangat setuju jika ada Hari Peneliti Nasional *yah*, saya rasa peneliti itu butuh hari di mana suaranya diaspirasi. Nanti perlu ada semacam orasi kebijakan, di mana peneliti punya wadah dalam menyuarkan aspirasi,” terangnya.

Berbeda dari kedua peneliti senior di atas, **Hadi Supratikta**, Ketua Bidang Analisis dan Rekomendasi Kebijakan HIMPENINDO (Himpunan Peneliti Indonesia) mengatakan, sebenarnya eksistensi himpunan penelitian sudah diwadahi

dalam berbagai organisasi seperti Himpenindo atau FKK (Forum Komunikasi Kelitbangan), namun sayangnya publikasinya masih kurang dan dianggap tidak ‘greget’, sehingga pentinglah Wacana Hari Peneliti Nasional tersebut sebagai apresiasi para peneliti terutama di daerah.

“Kaitannya kenapa hari peneliti itu penting, karena selama ini kegiatan penelitian di Kementerian/Lembaga itu di-nomor-sekian-kan, karena tidak dianggap penting. Lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 388 mengamanatkan bagaimana inovasi bisa berjalan. Ada *reward* untuk peneliti di daerah juga,” himbunya.

Ia menambahkan, jika Hari Peneliti Nasional dilaksanakan *reward* dan dana insentif ke daerah lebih diutamakan, sehingga ada karya-karya masyarakat di daerah yang muncul dan mendapat pengakuan. “Selama ini kan banyak inovasi dari daerah yang bagus namun kurang mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dan itu sangat disayangkan sekali,” tambahnya.

Sedikit berbeda dari Hadi, Syamsudin Haris justru tidak setuju sama sekali dengan adanya Hari Peneliti Nasional. Menurutnya, ia justru setuju dengan wadah aspirasi peneliti jangka panjang ketimbang perayaan yang hanya satu hari. “Harus dicari dulu urgensinya, saya memandang Hari Peneliti Nasional tidak penting-penting amat, yang penting adalah insentif peneliti. Kebanyakan Peneliti Utama di Indonesia yang sudah professor itu tidak ada kejelasan dana insentifnya sampai sekarang. Bagi saya anggaran penelitian ditingkatkan, karena itu akan menentukan daya saing bangsa kita ke depan. Selain itu, pemerintah harus menghargai hasil-hasil penelitian kita yang digunakan sebagai landasan kebijakan. Jadi tidak hanya wadah hasil penelitian sementara, tapi jangka panjang,” sarannya.

Wadah atau wujud apresiasi dari pemerintah sebenarnya sudah banyak dilaksanakan oleh lembaga terkait yang sudah maju seperti LIPI atau Kemenristek yang menghasilkan KIPNAS (Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional atau AKIL (Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa). Namun sayangnya acara tersebut kebanyakan berbasis sains dan teknologi saja. Sehingga belum ada yang mampu menaungi bidang Sosial, Politik, Budaya dan Humaniora. “Saran saya, coba diskusikan dulu dari beberapa peneliti dan komponen terkait. Di LIPI sudah banyak acara dan hari semacam itu,” paparnya.

Kapan terlaksana?

Beberapa peneliti yang kami datangi, sepakat wacana Hari Peneliti Nasional perlu didiskusikan lebih lanjut dengan peneliti seluruh Indonesia. Seperti duduk bersama dan melakukan *brain storming* untuk membahas kapan hari peneliti terlaksana. “Atau bisa berkonsultasi dengan peneliti legenda Indonesia, macam B.J Habibie yang banyak berinovasi untuk negara ini. Nanti perlu didiskusikan lebih lanjut apakah ditetapkan berdasarkan tanggal lahirnya B.J. Habibie, atau waktu di mana karyanya berhasil seperti Pesawat N-250,” saran Hadi.

Kehadiran B.J Habibie dianggap penting sebagai tokoh atau panutan para peneliti seluruh Indonesia. Meskipun, Hadi juga tidak menampik beberapa tokoh hebat lainnya. “Kita timbulkan tokoh inspirasi di Hari Peneliti tersebut, sehingga bisa memicu semangat peneliti untuk menirunya, seperti Habibie misalnya,” sarannya.

Namun berbeda dari Hadi, Nadeak justru lebih senang dengan efisiensi hari. Ia menganggap tidak perlu banyak hari dicanangkan untuk memperingatinya. “Tidak perlu lah masyarakat menghafal banyak hari peringatan atau *ceremonial*. Cukup digabung dengan beberapa hari penting

“Kaitannya kenapa hari peneliti itu penting, karena selama ini kegiatan penelitian di Kementerian/Lembaga itu dinomorsekiankan, karena tidak dianggap penting”

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya dibarengi dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 2 Mei, karena penelitian itu bagian dari pendidikan. Tidak perlu terlalu huru-hura atau sifatnya hanya *ceremonial* belaka,” tandasnya.

Beberapa saran dan masukan tentang penetapan Hari Peneliti Nasional tersebut memang sangat membantu. Mereka berharap semoga segala masukkannya menjadi pertimbangan serius Kepala BPP Kemendagri ke depan. Sehingga dapat menciptakan wujud nyata dari wacana Hari Peneliti Nasional.

Tidak sekadar perayaan

Sementara itu, saat ditanya akan diisi apa nantinya di Hari Peneliti Nasional itu, jawaban mereka sangat beragam. Ada yang menginginkan perlombaan karya ilmiah, ada yang ingin diisi oleh permainan edukatif sambil orasi, ada juga yang menginginkan penghargaan jangka panjang kepada para peneliti. “Siapkan dana, buat perlombaan karya ilmiah yang topik penelitian semua orang bisa ikut. Undang semua orang, buat kegiatan yang memotivasi. Bekali peneliti bagaimana cara penulis. Selain itu, ada *reward* untuk peneliti,” saran Nadeak.

Sementara itu, Ros lebih senang Hari Peneliti itu lebih diisi dengan permainan edukatif dan orasi kebijakan, sambil menunggu hasil pengumuman lomba karya ilmiah. “Ada *games* yang mengasah kerja sama peneliti, orasi kebijakan, dan perlombaan karya tulis ilmiah,” saran Ros.

Lalu Hadi sendiri berharap, ada semacam pameran dari daerah yang dapat ditunjukkan melalui Hari Peneliti tersebut, sehingga pemerintah pusat dapat lebih kaya lagi dalam menilai potensi-potensi inovasi berbasis riset yang ada di daerah.

Dari ketiga masukan tersebut, sejatinya mereka semua sepakat, Hari Peneliti Nasional tidak hanya diciptakan sebagai hari perayaan saja. Ada harapan-harapan yang terselip untuk kesejahteraan jangka panjang peneliti. “Penelitian itu ada, karena untuk mengetahui apa yang belum diketahui orang. Oleh karena itu, perlu hari penelitian



ini untuk mengingatkan orang bahwa segala sesuatunya itu perlu ditelusuri terlebih dahulu secara ilmiah melalui penelitian,” harap Nadeak. Harapan yang sama juga dicetuskan oleh Hadi, dia berharap BPP Kemendagri bisa serius dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut dan bisa menjadi tonggak sejarah adanya penghargaan dan pengakuan karya-karya penelitian. “Dari hari itu, ada

solusi bagaimana mengangkat persoalan peneliti. Harapannya ada tidak sekadar *event* pameran, tapi ada semacam deklarasi yang sukses. Semoga!” harap Hadi. (IFR)



PROFIL BPP KALTIM NUKLIR UNTUK RAKYAT

Kepercayaan untuk mengawal program nuklir dari Gubernur Kaltim tidak di sia-siakan oleh BPP Kaltim. di tengah pro kontra wacana energi nuklir, BPP Kaltim mampu mengubah nuklir menjadi sesuatu yang berbeda. Nuklir pun tidak lagi dikaitkan dengan reaktor dan sesuatu yang mengkhawatirkan oleh masyarakat.



lir. Lebih lanjut kata Dwi, karena nuklir tidak melulu masalah reaktor yang dianggap angker oleh sebagian masyarakat.

“Jadi, jika bicara nuklir bukan hanya difungsikan untuk membangun PLTN, tetapi bidang lainnya, contohnya ketahanan pangan dan kesehatan,” ujar Dwi Nugroho Hidayanto.

Seiring dengan upaya-upaya tersebut dan hasil-hasil penelitian, teknologi nuklir kian dikenal di kalangan masyarakat, khususnya di Kaltim. Melalui penelitian *Demonstration Plot* (Demplo) (suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan) yang dilaksanakan, BPP Kaltim memperkenalkan varietas padi Sidenuk yang bibitnya dihasilkan BATAN. Varietas padi tersebut kini mampu memproduksi 7,5 ton per hektar setiap panen. Hal tersebut sekaligus membuktikan, nuklir sangat bermanfaat dan telah menghasilkan varietas-varietas unggul yang mampu beradaptasi dengan baik di wilayah Indonesia.

tersebut. BPP Kaltim pun hingga saat ini telah mengawal program kelitbangan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh BPP Daerah lain di Indonesia. Program tersebut adalah penelitian kebijakan pemanfaatan Iptek nuklir untuk kesejahteraan masyarakat. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan program berikutnya yaitu pengembangan diseminasi kawasan industri nuklir di Kabupaten PPU seluas 20 Ha.

Dalam rangka Sosialisasi Permendagri No 17 Tahun 2016, di Hotel Orchardz Industry Jakarta Kepala BPP Kaltim Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan, BPP Kaltim tengah melakukan penelitian lebih jauh tentang pemanfaatan energi nuklir. Pihaknya akan selalu mendukung program Pemerintah Kaltim khususnya yang telah diamanatkan kepada BPP Kaltim.

Menurut Dwi, BPP Kaltim berpikir lebih jauh, nuklir sama sekali tidak membahayakan. Justru dalam beberapa bidang seperti kesehatan, industri atau pertanian nuklir sangat bermanfaat. Program-program itulah yang kemudian dikembangkan oleh BPP Kaltim untuk diperkenalkan kepada masyarakat mengenai manfaat nuklir.

Meledaknya reaktor nuklir (PLTN) di berbagai belahan dunia membuat kekhawatiran sejumlah masyarakat. Khususnya masyarakat anti nuklir, akan rencana pembangunan berbagai hal yang berkaitan dengan energi nuklir. Tanpa alasan apapun, Nuklir tidak ayal dianggap sebagai energi berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia.

Para aktivis lingkungan semakin terang-terangan menunjukkan penolakannya, tatkala Pemerintah Kalimantan Timur kian terbuka dengan wacana pengembangan nuklir di daerahnya. Keterbukaan Pemerintah Kaltim terlihat dari beberapa program yang digagasnya berupa rencana pembangunan Pusat Sains Teknologi dan Industri Nuklir (PUSTIN) dengan mengambil lokasi di Kawasan Industri Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim sejak 2013, memberikan perintah kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kaltim untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait nuklir

“Bisa dibayangkan jika penanaman dilakukan hingga tiga kali per tahun, maka berapa juta ton yang bisa dihasilkan daerah. Selain padi kita juga mengembangkan kedelai mutiara, yang lebih baik dari kedelai biasa,” kata Professor Dwi yang kini menjabat Kepala BPP Kaltim itu.

Terkait wacana pembangunan Area PUSTIN, Kepala Bidang Kesra BPP Kaltim Nur Albarkati ikut bicara. Pembangunan *Nuclear Industrial and Science Techno Park* (PUSTIN) yang di dalamnya akan dibangun reaktor nuklir, merupakan program jangka panjang Kaltim. Sementara untuk saat ini apa yang dilakukan BPP Kaltim masih berfokus pada memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kaltim.

“Nuklir tidak hanya menghasilkan varietas tanaman padi yang sudah dijelaskan tadi, termasuk pengawetan lebih lama terhadap buah-buahan yang cepat busuk misalnya, atau terhadap sayur-sayuran. Nah, pembangunan nuklir sedang kita arahkan ke sana,” tegas Nur.

Nur menambahkan, keberadaan PUSTIN pada masa mendatang akan berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan berbagai teknologi baik dari kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

“Fasilitas ini akan mendukung pengembangan inovasi hingga penelitian menggunakan teknologi nuklir. Sebagai contoh, di dunia kesehatan kita mengenal *rontgen* merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari nuklir. Masyarakat tidak sadar tentang itu, dan sangat bermanfaat,” ujar Nur.

Tawaran dari Negara Lain

Menguatnya isu pembangunan kawasan nuklir di Kaltim, membuat negara-negara dengan industri nuklir terbesar berbondong-bondong menawarkan kerja sama energi nuklir, baik kepada Pemerintah Kaltim maupun kepada Presiden Joko Widodo.

Dwi Nugroho mengatakan beberapa Perusahaan Energi Nuklir seperti Rosatom, Rusia, dan China General Nuclear Power Corporation (CGN), China, telah menawarkan kerja sama pemanfaatan energi nuklir kepada Kaltim. Rosatom menawarkan pendirian sebuah cabang industri nuklir yang termasuk di dalamnya pusat penelitian, pusat pelatihan tenaga kerja, penggunaan nuklir di bidang me-



dis, dan untuk tujuan ilmiah lainnya. Rusia menegaskan bahwa PLTN yang dibangun Perusahaan Energi Nuklir Negara Rusia Rosatom sesuai dengan standar umum keselamatan nuklir, dan tidak hanya aman untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan.

Tidak jauh beda dengan Rasatom, CGN kian agresif mendekati Pemerintah Kaltim. Selain kedua perusahaan besar tersebut, negara seperti Perancis dan Amerika kian instens melakukan pendekatan. Beberapa calon investor dibidang nuklir beralasan, energi nuklir adalah solusi konkret bagi pembangunan bangsa. Mengingat, jumlah pertumbuhan dan kebutuhan energi yang semakin lama semakin meningkat di Indonesia, dan biodiesel tidak mungkin lagi memecahkan masalah kebutuhan energi.

Nur Albarkati mengatakan masyarakat harus mulai mengubah paradigma tentang nuklir. Di berbagai negara, nuklir tidak lagi dipandang sebelah mata. Negara-negara berkembang mulai menggunakan nuklir untuk kesejahteraan bangsanya.

“BPP Kaltim berpikir lebih jauh, nuklir sama sekali tidak membahayakan. Justru dalam beberapa bidang seperti kesehatan, industri atau pertanian nuklir sangat bermanfaat.”

“Saat ini Bangladesh saja bangun nuklir, India tidak mau ketinggalan, negara kita lebih mampu dan maju dari pada mereka. Kita harus mulai membuka mata, 30 persen energi Korea dari nuklir. Selain itu Malaysia juga akan menjadi pemasok listrik di ASEAN dengan energi nuklirnya,” terang Nur.

Dalam beberapa kesempatan, banyak anggapan terkait bahaya yang ditimbulkan dari nuklir. Mereka selalu mencontohkan kejadian di Fukushima, Jepang. Namun hal itu ditampik oleh Nur yang mengatakan, kejadian di Jepang merupakan kesalahan teknis yang bisa diatasi sangat sederhana. Terkait alasan, Indonesia sebagai daerah yang rawan bencana, Nur mengilustrasikan logika sederhana.

“Jepang negara yang rawan gempa saja membangun PLTN, kenapa Indonesia tidak. Sementara jika ada lagi alasan bahwa uranium berbahaya. Indonesia bisa membangun reaktor dengan bahan *thorium* yang jauh lebih

aman dari *uranium*, meski sebenarnya *uranium* tidak berbahaya jika di alam bebas,” ucap Nur.

Nur juga mempertanyakan sikap para aktivis yang menganggap berbahaya untuk masyarakat, sementara wacana Malaysia membangun reaktor di negaranya yang berada di Kalimantan, sama sekali tidak pernah mendapat penolakan.

Komitmen BPP Kaltim mengawal pembangunan nuklir juga ditunjukkan dengan membentuk sebuah perkumpulan Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), yang secara rutin melakukan diskusi. HIMNI juga tidak jarang diundang oleh pihak PLTN China.

BPP Kaltim pun saat ini tengah membuat *roadmap* terkait PUSTIN tersebut, yang diperuntukkan jangka panjang. Pihak BPP Kaltim terus memberikan paparan mengenai wacana pembangunan tersebut kepada Kemenristek dan Dikti serta kepada Bappenas. Agar mendapat dukungan sebelum melanjutkan ke pihak Presiden Joko Widodo.

“Menegenai hal tersebut pihak BPPT dan Batan sudah kompak. Sudah mulai ada lampu hijau dari mereka terkait pengakajian mengenai PUSTIN yang jangka panjangnya adalah PLTN,” tukas Dwi.

Wacana pemanfaatan energi nuklir patut didukung jika untuk kesejahteraan dan kedamaian manusia. Jangan sampai ketika cita-cita bersama membangun nuklir sebagai energi terbarukan yang menyejahterakan dan dapat memperbaiki lingkungan sudah tercapai. Justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa menghiraukan dampak negatif yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak.

Yang mudah dipahami oleh kita bersama adalah nuklir seharusnya bisa menjadi energi yang dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ketika nuklir menjadi barang komoditas dan dimiliki segelintir pihak swasta, yang terjadi adalah penjajahan model baru yang tidak hanya melibatkan kapitalisme global, tetapi kejahatan luar biasa yang akan ditimbulkan. (msr)

BPP KALIMANTAN BARAT MENGHIDUPKAN INOVASI DI TENGAH KETERBATASAN

Lahirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menelurkan sejumlah keputusan yang mengharuskan organisasi perangkat daerah termasuk BPP, untuk terus bergerak maju dan berkomitmen tinggi dalam membantu tugas pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembentukan Badan secara mandiri. Di satu sisi, lahirnya PP ini memberikan angin segar pada mereka yang memunyai komitmen tinggi, namun di sisi lain mereka yang lambat harus siap menerima hasil penilaian daerah untuk menjadi badan ataukah disatukan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya).



Kurangna dukungan pemerintah terhadap riset dan pengembangan di Provinsi Kalimantan Barat terlihat dengan hanya berdirinya kantor Penelitian dan Pengembangan yang kini dipimpin oleh pejabat Eselon III,

Yohanes Budiman.

Pernah Menjadi Badan

Kantor ini dulunya pernah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada 2014, lalu menurun menjadi kantor atas berbagai pertimbangan. “Sepengetahuan saya,

dulu kantor ini tidak dianggap punya kapasitas untuk jadi Badan. Menurut Pemerintah Daerah kala itu, Badan ini cukup UPT saja,” kata Yohanes saat ditemui usai acara Sosialisasi Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh BPP

Kemendagri di Hotel Orchard, Jakarta.

Dinilai masih belum mampu, dari Unit Pelaksana Teknis, BPP Provinsi Kalimantan Barat berubah menjadi kantor. Pada masa itu, kinerja BPP Kalbar masih dinilai dengan stigma negatif, dengan plesetan ‘Sulit Berkembang’.

Namun waktu silih berganti, pemerintahan daerah dan kepala kantor litbang pun telah berganti kepemimpinan. Terlebih dengan lahirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dituntut kembali menjadi Badan.

“Saat ini kami tengah mempersiapkan untuk menjadi Badan. Kita sudah mengalami berbagai dinamika dan struktur. Sebenarnya dulu bisa kita perjuangkan tetap menjadi Badan, asal kita bisa menunjukkan kinerja yang baik. Namun sayangnya kita belum mampu. *Nah*, saat ini kita memang sedang membangun diri dan kapasitas agar bisa terbentuk kembali menjadi Badan,” terangnya.

Berjuang di Tengah Keterbatasan

Meski diakui di tengah keterbatasan, sumber daya manusianya. Kantor Litbang ini tidak pernah menyerah dalam berjuang agar kembali menjadi Badan. “Meski kami hanya mempunyai dua peneliti, tapi kami yakin bisa kembali lagi menjadi Badan,” tandas Yohanes.

Dengan keterbatasan peneliti itulah, Yohanes dan kawan-kawan mencoba mengajukan personil peneliti kepada pemerintah setempat. Beruntung, gubernur saat ini sangat mendukung dan mendorong penelitian di Kalimantan Barat. “Kami mencoba mengajukan peneliti kepada pemerintah daerah, dan *alhamdulillah* diberikan tenaga 3 peneliti, dan 2 perekayasa. Kalau ini dilakukan setiap tahun, saya yakin dengan kekuatan seperti ini, bukan hanya kembali menjadi Badan, tapi menjadi Badan Penelitian terpercaya di Kalimantan Barat,” terangnya optimis.

Terbukti, perjuangan di tengah keterbatasan yang dilakukan oleh semua struktur dan fungsional Kantor Litbang Kalimantan Barat menemukan titik terang. Hasil penilaian dari pembentukan badan, mengarah ke BPP tipe A. “Selain kerja sama internal, Pemerintah

Daerah yang sekarang juga sangat mendukung kami. Dalam penilaian kemarin skor mengarah ke tipe A. Kita pasti akan meningkatkan dulu sumber daya yang ada, jangan sampai terjadi stigma negatif sulit berkembang terus. Kalau mereka sudah memercayakan kami, tantangan berikutnya adalah mengisi formasi dengan orang-orang yang benar dan berkomitmen tinggi terhadap lembaga ini,” tegasnya.

Khawatir Peneliti Jenuh

Dukungan terhadap Kantor Litbang Kalimantan Barat memang diberikan sepenuhnya oleh pemerintah setempat, namun masih ada beberapa kekhawatiran yang bisa saja dialami oleh peneliti di Kalbar. “Hanya saja kendala kita *kan* ada sertifikasi, dan prosesnya lama. Harus ke kantor pusat (Kemendagri-red). Yang saya khawatirkan ada kejenuhan dari teman-teman peneliti. Kalau tidak dijaga semangatnya, bisa dimanfaatkan jadi struktural. Karena saya maunya, peneliti itu ya sibuk meneliti, bukan persoalan administratif,” paparnya.

Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh Rizky, calon peneliti di Kantor Litbang Kalbar, dia berharap ke depannya urusan administratif tidak dibebankan kepada peneliti. “Semoga tidak ada lagi yang namanya rangkap jabatan. Saya berharap urusan sertifikasi peneliti juga bisa dipercepat, apalagi di provinsi pedalaman seperti kami ini,” ungkap peneliti yang baru saja mengikuti diklat itu.

Meski begitu, Kantor Litbang Kalbar sangat berterima kasih pada BPP Kemendagri atas peluangnya untuk bisa mendirikan badan kembali, dengan dukungannya melalui PP OPD, dan Permendagri tentang Penelitian dan Pengembangan. “Teman-teman di BPP Kemendagri sudah memberikan peluang besar agar kami bisa mendirikan Badan sendiri. Kami berharap koordinasi dan sosialisasi seperti ini terus berjalan dengan baik, kita di daerah kadang merasa bingung mau menginduk ke mana. Saya berharap ada pembinaan yang baik. Jangan sampai terulang penurunan seperti kami, dari Badan menjadi Kantor,” jelasnya.

Yohanes juga berharap dengan kewenangan yang lebih besar karena sudah menjadi Badan ke depannya, BPP Kalbar bisa lebih bergerak dan percaya diri, membangun jaringan, melakukan penelitian lintas sektor.

“Saya punya keinginan ke arah satu ini,” tambahnya.

Minat Inovasi Sangat Tinggi

Meski di tengah keterbatasan, semangat untuk melakukan inovasi sudah dilakukan Kantor Litbang Kalbar sejak dari dulu. Mereka rutin mengadakan perlombaan karya ilmiah tingkat mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum sesuai dengan tema yang dirumuskan setiap tahun. “Terkait inovasi kita rangkum dalam lomba karya ilmiah dan perekayasa. Sesuai RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Seperti tahun ini, tema kita tentang Sumber Daya Manusia dan Energi Hilir Pangan,” kata Yohanes.

Menurut Yohanes, antusias pesertanya sangat tinggi. Setiap kali penyelenggaraan bisa menyaring lebih dari 100 karya ilmiah. “Kita selalu menginformasikan dari awal tahun, mensosialisasikan dengan media massa, dan teman-teman BPP Kabupaten/Kota. Pesan-pesannya kita sampaikan ke jaringan TV lokal ke 14 kab/kota terpencil,” paparnya.

LKI (Lomba Karya Ilmiah) di Kalimantan Barat dari tahun ke tahun pemenangnya beragam. Ada dari kalangan guru, pelajar, dan mahasiswa. “*Rewardnya* kita upayakan ada peningkatan. Juara 1 dari Rp 5 juta, bisa kita *upgrade* 10 juta, dan itu menjadi daya tarik warga sejauh ini. Untuk di pulau Kalimantan sendiri lomba karya ilmiah masih terbatas, untuk itu kantor litbang kami memunyai tugas mengembangkan inovasi dari masyarakat. Walaupun inovasi sederhana, tapi kami selalu memberikan penghargaan pada masyarakat. Pemenang tidak hanya mendapatkan uang tunai, tapi akan kita profilkan di media massa, dan dimuat dalam *jurnal kami*,” tutupnya. (IFR)





DAERAH

Pertunjukan Wayang Orang Bharata

TETAP HIDUP DI TENGAH MODERNITAS

Ketika gedung-gedung pencakar langit berdiri megah memadati setiap sudut kota dan zaman mulai beralih ke era modern, dengan sendiri membawa masyarakat kota semakin tidak kenal seni tradisional. Alih zaman juga membawa dampak peralihan budaya. Budaya lokal mulai kehilangan arah, keberadaan kelompok kesenian tradisional semakin tergerus. Tempat pertunjukannya pun tak sedikit beralih fungsi menjadi perkantoran dan tempat-tempat hiburan malam.

Namun, tidak dapat disangka, Jakarta masih punya cerita, bagaimana budaya dan kesenian tradisional masih eksis terpelihara, salah satu tempat yang masih dipertahankan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah gedung kesenian Baratha yang terletak di di Jalan Kalilio No 15, Senen, Jakarta Pusat.

Ketika banyak kelompok kesenian wayang orang bertumbangan karena tergerus zaman, eksistensi Paguyuban Wayang Orang Bharata juga menarik untuk dibicarakan. kelompok yang berdiri sejak 1972 ini masih bertahan sampai sekarang.

PERTUNJUKKAN WAYANG ORANG DI
GEDUNG KESENIAN BHARATA, JAKARTA



Alunan musik gamelan melangkah beriringan dengan damai. Tenang, berciri khas nuansa budaya Jawa yang kental. Belasan pemain saling bersaut-sautan mendendangkan berbagai jenis gamelan. Menabuhkan gendang, bonang, demung, kenong, gong, gambang, dan meniup suling.

Nampak salah satu personil mereka terdiri dari perempuan paruh baya memainkan gamelan berjenis saron, sebuah alat musik yang berbentuk besi panjang berdempetan, yang menghasilkan irama musik yang indah. Mereka tampak kompak dan piawai dengan ciri khas seragam Jawa bewarna biru.

Lima penari wanita datang sambil membawa busur dan anak panah. Melenggak-lenggok menarikan tarian Wira Pertiwi ciptaan Bagong Kusudirdjo, sambil sesekali berputar memegang panah yang dibawanya. Sebagai pertunjukan pembuka, mereka berhasil menghibur penonton yang rela datang di tengah guyuran hujan deras Malam Minggu itu.

Menyuguhkan Tema Unik

Cerita pewayangan orang atau dalam Bahasa Jawa yang dikenal dengan Wayang Wong itu memang berlangsung sejak lama. Namun hanya beberapa saja yang masih hidup di tengah modernitas bangsa ini.

Malam itu, WO (Wayang Orang)

Bharata menyuguhkan cerita tentang Petruk Jadi Ratu. Cerita yang unik, menggelitik tawa, dan berbeda tentunya, yang menginspirasi sang Sutradara Sentot Erwin & D. Supono. H.U mengatur skenario agar keberlangsungan WO Bharata ini tetap dipertahankan.

Dalam tiga bulan ini, yakni Oktober-Desember 2016, WO Bharata telah mempersembahkan berbagai penampilan dan alur cerita yang unik setiap Sabtu. Seperti pada Oktober ini, ada tema "Gatot Kaca Nagih Janji", "Petruk Jadi Ratu", dan "Bengawan Kilat Buwono" yang menjadi Grand Tema di bulan Oktober. Selanjutnya pada November, ada serial Ramayana "Hanoman Kembar", "Gareng jadi Sembrono", dan "Gatotkaca Kembar". Terakhir pada Desember, WO Bharata akan menyuguhkan Pentas Khusus Menyambut Tahun Baru 2017 yang temanya masih dirahasiakan.

Hal ini tentu berbeda ketika tidak ada event tiga bulanan, WO Bharata selalu menampilkan pertunjukan cerita yang berseri (bersambung). Sehingga mengundang penontonnya untuk datang lagi dan memahami alur ceritanya. Beruntung, Tim MediaBPP hadir saat event berlangsung, sehingga tema yang diceritakan malam itu (22/10) berlangsung tamat dan tanpa cerita yang menggantung.

Ramai Pengunjung

Tidak hanya itu, penontonnya pun

terdiri dari berbagai kalangan. Ada orang tua, dewasa, anak-anak, maupun remaja memenuhi gedung yang terletak di Jl. Kalilio 15, Senen, Jakarta Pusat itu. Mereka yang datang kebanyakan membawa mobil, dan hanya beberapa saja yang membawa sepeda motor. Sayangnya, tidak ada lahan parkir mobil pada Gedung Bharata. Mereka terpaksa menggunakan separuh badan jalan di depan gedung untuk memarkirkan kendaraannya.

Beberapa ibu-ibu tampak disanggul sasak dan menggunakan pakaian berbahan sutera. Terdapat pula bapak-bapak lengkap dengan jas-nya yang nעים. Penampilan mereka seolah hendak datang ke acara resmi ke-presiden-an, sambil membawa serta anak-anak dan sanak keluarga. Meski terkadang di tengah pertunjukan, anak-anak mereka tidur terlelap dalam alunan musik Jawa yang lembut.

Kami mencoba mewawancarai beberapa pengunjung, seperti Aryo Saktio, pria paruh baya yang mengajak serta isteri dan anaknya dalam pertunjukan malam itu. "Ya setiap malam minggu ke sini, karena saya memang lebih asyik nonton wayang daripada nonton bioskop," kata pria yang mengenakan jas hitam itu.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan dia rela antri untuk memperebutkan kursi yang berjumlah 245 itu lho. "Jauh-jauh saya dari Pondok Labu, saya dari jam 7.30 di sini untuk meluangkan

malam Minggu bersama keluarga," katanya.

Aryo tidak sendirian, WO Bharata juga dihadiri beberapa pengunjung bule dari berbagai macam negara sambil sesekali memotret para pemain gamelan dan pertunjukan berlangsung.

Sekadar informasi, gedung ini memang cukup lebar, terdiri dari Kelas VIP berada di depan panggung dengan harga tiket sebesar Rp 60.000, lalu ada juga kelas I (di belakang VIP) dengan harga tiket sebesar Rp 50.000 dan kelas Balkon (di atas) dengan harga tiket Rp 40.000. Kebanyakan penonton Bule dan orang-orang yang mengenakan jas duduk di bangku VIP, agar lebih dekat dalam menyaksikan pertunjukan.

Menyantap Makanan

Tidak kalah dengan bioskop, selain menikmati pertunjukan, penonton juga bisa menikmati hidangan ringan dan berat. Pasalnya, ada berbagai jajanan di depan Gedung Bharata yang siap menambah keasyikan pertunjukan Wayang.

Anda bisa membeli makanan terlebih dahulu sebelum masuk, atau jika lupa membeli makan ada jasa *delivery* yang siap mengantar ke tempat dimana Anda duduk. Harganya lumayan murah, untuk satu porsi Sate Ayam, Anda cukup merogoh kocek Rp 18.000, dan untuk semangkok Mie Instan, Anda hanya perlu mengeluarkan uang Rp 9.000.

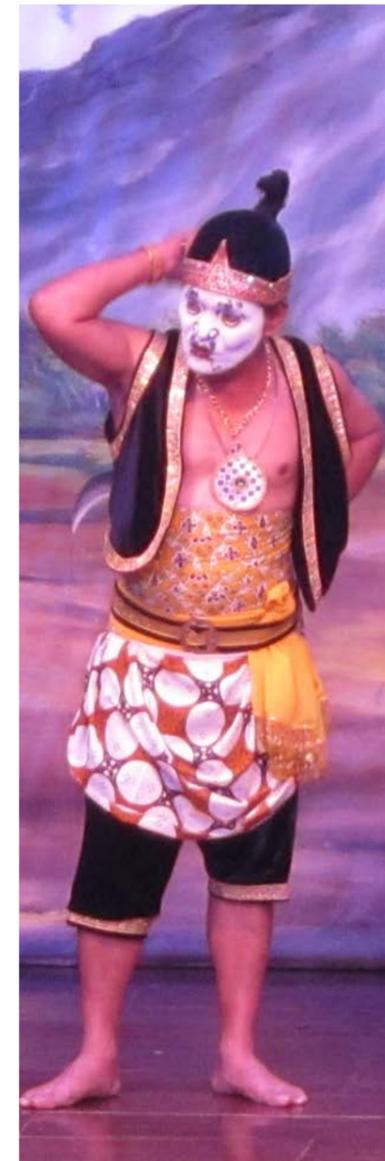
Berdiri Sejak 1960-an

Asal usul WO Bharata sebenarnya sudah lama berdiri. Berawal dari sebuah kelompok Pancamurti (belum Bharata) pada 1963, perkumpulan pemain Wayang ini masih berupa kelompok yang dimodali oleh Bapak Suyono. Kala itu, mereka pemain wayang dibayar perpentas bermodalkan dari harga tiket yang dijual setiap harinya.

Lalu pada 1972 gedung yang memang milik Pemda DKI ini diminta kembali oleh pemiliknya. Para pemain Pancamurti pun terpecah menjadi dua. Ada yang tetap tinggal di gedung meski namanya harus berganti menjadi Bharata (sesuai dengan Pemrov DKI), ada yang memilih tetap dengan nama Pancamurti dan terpaksa pindah ke Tanjung Priok.

Namun sayang, grup Pancamurti nampaknya tidak mampu bertahan dengan perkembangan zaman, dan bubar begitu saja. Beruntung Wayang Bharata masih mampu bertahan di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemrov. DKI Jakarta.

"WO Bharata ini baru berdiri tepatn-



ya sejak 5 Juli 1972. Kami menaungi lebih dari seratus penari, pengrawit dan sinden. Hingga akhirnya mendapatkan piagam rekor dunia sebagai penyelenggara pergelaran Wayang Orang Regenerasi karena sudah dari tahun ke-tahun selalu membangun generasi," ungkap M. Yunus salah satu pengelola WO Bharata

Konon katanya, WO Bharata ini sudah mencapai lima generasi, yang para pemainnya selalu dilatih dan diikuti serta sejak kecil. Mulai dari sanak keluarga, anak mereka, hingga lingkungan sekitar diajak untuk bermain lakon di WO Bharata tersebut. Itulah mengapa tidak heran jika anak-anak usia TK dan SD sudah piawai dalam menari dan bermain peran dalam pertunjukan WO Bharata. "Kami bersyukur pemerintah memunyai peran dalam pelestarian kebudayaan ini, meskipun kami bukan membawakan budaya Betawi. Tapi pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini senantiasa mendukung kegiatan kami," terangnya.

Tidak hanya itu, kejayaan pewayangan ini mampu mereka tunjukkan dengan tampil ke berbagai negara untuk memamerkan budaya lokal bangsa Indonesia. Mereka pernah ke Jerman (1981), Istanbul Turki (1983) dan Belanda (1999).

Perjalanan panjang WO Bharata ini pula tidak terlepas dari pasang surut para pemainnya. Terutama saat sepulang pentas dari Belanda. Sekira 1999, gedung Bharata tengah tahap renovasi oleh Pemrov DKI, sehingga membuat mereka tidak bisa tampil dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah menjanjikan renovasi akan selesai dalam jangka dua tahun, namun selama empat tahun pembangunan renovasi tidak kunjung selesai, sehingga membuat mereka sempat vakum dan beberapa pemain terpaksa tampil di Gedung Kesenian Jakarta. Selama itulah mereka mengalami pasang surut, pemainnya satu per satu keluar kaena ketidakpastian tersebut.

Namun, setelah gedung itu selesai direnovasi, empat tahun kemudian, mereka mencoba mengumpulkan kembali personilnya dan akhirnya terbentuklah kembali pertunjukan Bharata hingga saat ini.

Meskipun kini pementasan hanya setiap Sabtu malam saja. Semangat mereka tidak pernah luntur, dan terus setia menjaga kelastarian budaya bangsa Indonesia itu. "Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi," tandas Yunus. (IFR)

KENAIKAN DANA PARPOL TUNGGU KEPUTUSAN PRESIDEN

Wacana menaikkan dana partai politik (parpol) kembali muncul ke permukaan setelah Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung beberapa waktu lalu.

“Beberapa pekan lalu kita sudah menyampaikan kembali usulan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 dan miah menunggu PP hasil revisi itu diterbitkan,” ucap Yuswandi

Menurut Yuswandi bantuan keuangan untuk parpol ditujukan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik. Ia menegaskan, di PP No 5 Tahun 2009 secara eksplisit diatur bahwa 60 persen anggaran digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya operasional.

Hal yang sama disampaikan oleh Soedarmo Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), ia mengatakan, pasalnya dan aprpol yang disubsidi negara saat ini masih terbilang minim, yakni sekira Rp 108 per suara. Selain itu, dana parpol juga belum cukup untuk menopang biaya operasional, yang berdampak pada kualitas parpol menjadi lemah.

Selanjutnya, kata Soedarmo, pengajuan revisi PP untuk



mempertimbangkan besaran peningkatan bantuan dana parpol tersebut, juga mempertimbangkan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Alasan tersebut dikarenakan, pemerintah masih memiliki kesulitan mengatur kondisi keuangan negara. “Kita juga melihat kondisi keuangan pemerintah yang masih sulit. makanya kita banyak pertimbangan terkait hal itu,” tambah Soedarmo.

Kemendagri pun menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo terkait pengajuan revisi PP tersebut. Terlebih, soal besaran peningkatan bantuan dana parpol tersebut.

Dengan pemberian dana untuk partai politik dari pemerintah itu diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal pendanaan serta mampu menjadikan pendidikan politik semakin berjalan dengan baik. (diolah dari berbagai sumber)

MENDAGRI AJAK KEMBANGKAN EKONOMI KREATIF BERDIMENSI KEARIFAN LOKAL

Pada penyelenggaraan Pekan Produk Budaya Indonesia Nusantara Expo dan Forum 2016, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh komponen bangsa agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi dengan mengembangkan ekonomi kreatif.

“Agar stabilitas ekonomi sehat dan dinamis dapat terwujud,” ujar Tjahjo Kumolo saat membuka Pekan Produk Budaya Indonesia dan Nusantara Expo dan Forum 2016 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Melalui rangkaian tersebut, Tjahjo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama menjaga dan melestarikan citra positif bangsa Indonesia yang berbudaya, bermartabat dan berjatidiri. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan

pariwisata dan kemandirian ekonomi. “Kegiatan ini dapat memberikan informasi dan potensi wisata di daerah,” jelasnya.

Tjahjo juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan Pekan Produk Budaya Indonesia Nusantara Expo dan Forum tersebut di daerah. Dengan berkordinasi bersama para pelaku dunia usaha dan sektor terkait lainnya. “Sehingga kegiatan ini dapat menjadi wadah inspirasi usaha kreatif masyarakat di daerah, sekaligus pilar ketahanan nasioal yang tangguh untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean dalam bingkai NKRI,” ujar dia.

Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menambahkan,

Pekan Produk Budaya Nusantara Expo 2016 merupakan kegiatan strategis dalam mendorong pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian dan jadi diri bangsa sesuai dengan amanat Trisakti, sebagaimana menjadi visi pembangunan nasional saat ini.

Menko Puan mengatakan produk-produk budaya Indonesia sangat beragam, seperti batik, kain, tenun, jamu, kuliner, seni tari, seni lukis, seni patung, seni ukir dan lain sebagainya, telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

“Perkembangan jaman menuntut produk budaya ini tidak hanya sebagai ekspresi nilai budaya tetapi juga dituntut dapat memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat bertahan dalam perkembangan dan tuntutan jaman,” ucapnya.



MENDAGRI OPTIMIS RUU PEMILU TEPAT WAKTU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan selesai tepat waktu.

Tjahjo mengatakan terlambatnya penyerahan draf bukan hal yang disengaja. Menurut dia, hal itu terjadi karena beberapa isu yang masih dimatangkan. Tjahjo menginginkan usul dalam draf RUU pemilu yang disampaikan pemerintah benar-benar matang. Selain itu, draf RUU harus benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat dan juga berlaku jangka panjang, sesuai amanat presiden.

“Yang disajikan harus matang. Itu kan sikap pemerintah yang harus dipertahankan di hadapan DPR, jangan setiap saat diganti, jangan sampai timbul masalah di mana ada gugatan ke MK, aspirasi masyarakat harus ditampung, kedaultaan parpol, DPR, Presiden juga harus ditampung,” tegasnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono berpendapat masih terdapat beberpa poin-poin yang diprediksi akan menjadi pembahasan yang ruwet. Salah satunya mengenai sistem pemilu terbuka atau tertutup, serta penetapan dapil.

Soni menambahkan, pembahasan

akan berupaya seproporsional mungkin. Tidak mementingkan partai besar maupun kecil. Dari poin-poin krusial yang ada alan dicari titik komprominya.

“Jadi bukan bicara dalam konteks partai kecil yang diuntungkan, partai besar yang diuntungkan. Tapi lebih kepada perspektif keadilan proporsional. bagaimana keterwakilan itu menjadi betul-betul proporsional. Karena 50 persen pandangan pemilu itu kan pemerintah. 50 persen lagi partai-partai. Di sini lah letak komprominya untuk mencari posisi yang imbang antara dewan dan pemerintah” ujar Soni.

Sebelumnya, Presiden mengungkap RUU Pemilu dilakukan untuk menyiapkan regulasi baru guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan.

“Untuk itu saya minta dalam rancangan UU yang diusulkan pemerintah subtansinya menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah,” ungkap Jokowi.

Ketiga UU yang akan disatukan adalah UU Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD (legislatif); UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta UU Penyelenggaraan Pemilu. (diolah dari berbagai sumber)

MENDAGRI: DUA TAHUN PEMERINTAHAN, DAERAH TERUS BERBENAH

Dalam dua tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membenahi hubungan dengan para menteri dan jajarannya termasuk pemerintah daerah.

Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu lalu. Dia menyebut, Presiden Jokowi ingin seluruh pembantunya di kementerian hingga kepala daerah bisa selaras. “Pemerintahan saat ini adalah poros tunggal, tegak lurus baik presiden sampai kepala desa/kelurahan,” ujar Tjahjo Kumolo.

Hal itu dilakukan presiden seiring dengan pembenahan di sektor pelayanan masyarakat. Mulai dari pemberantasan pungutan liar (Pungli), mempercepat reformasi birokrasi, hingga pelayanan perizinan yang cepat. Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian terhadap pembangunan di daerah.

Terbukti dengan berbagai proyek pembangunan di daerah, mulai dari pembangunan jalan tol, bendungan, waduk, bandara, pelabuhan, dan dermaga. Harus diakui, tambahnya, dalam dua tahun program pembenahan pemerintah dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tuntas. Pasalnya, adanya kendala yang tengah melanda Indonesia, termasuk pelemahan ekonomi global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kurang bergairah.

“Kalau mengukur pembangunan infrastruktur, membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harus efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah ya sekarang sedang dalam proses,” katanya. (Puspen Kemendagri)

Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

SEJAK KECIL SELALU PENASARAN

Langkah kaki mungil anak laki-laki berlari membelah jalanan, sambil berloncat-loncat ia tengah asyik bermain dengan teman sebayanya. “Lihat itu gunung! Aku heran kenapa gunung berbentuk kerucut ya?” tanya Iskandar Zulkarnain penasaran.

Siapa sangka, bocah kelahiran 14 April 1959 kini menjadi orang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuannya. Rasa haus akan penasarannya seolah menjadi bibit-bibit kemajuannya sekarang.

Ingin Jadi Dokter

Saat ditanya bercita-cita jadi apa, sejak kecil pria yang kini menjadi profesor itu selalu menjawab ingin menjadi dokter, ia lantas berbagi cerita tentang mimpi masa kecilnya yang tidak pernah terpikir menjadi peneliti. “Saya ingin menjadi dokter, ini adalah mimpi standar anak-anak,” ungkapnya sambil mengenang masa lalu.

Cita-cita itu bukan sembarangan terlontar begitu saja dari mulut mungilnya. Iskandar kecil sempat berpikir

bahwa dokter adalah profesi yang cukup sejahtera.

Namun sayangnya rasa ingin tahunya terus tumbuh bahkan mengalahkan hasratnya mendalami ilmu kedokteran. Ia menyenangi hal-hal yang bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Pertanyaan-pertanyaan sederhana selalu muncul dalam pikirannya seperti kenapa bebatuan bisa muncul dengan bentuk yang seperti tertata rapi, kenapa gunung berbentuk kerucut. “Jawaban yang saya dapat kerap tidak memuaskan pertanyaan saya. Saya jadi semakin penasaran dan berusaha mencari tahu jawabannya sendiri,” tandasnya.

Mulai Jadi Peneliti

Dorongan menjadi peneliti berawal dari rasa penasarannya yang selalu tidak puas. Rasa penasaran itu kemudian mengkristal dan mendorongnya untuk menjadi peneliti. Iskandar lantas memilih kuliah Geologi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menjadi sarjana pada 1985. “Lulus kuliah saya mendapatkan berbagai tawaran pekerjaan di bidang pertambangan. Walaupun ada beberapa tawaran menggiurkan, tetapi saya memilih LIPI untuk mengabdikan ilmu pengetahuan saya,” katanya.

Pendidikan sarjana yang sudah ditempuhnya tidak cepat membuat Iskandar merasa puas. Banyak fenomena bumi yang tidak terungkap secara memuaskan selama duduk di bangku kuliah. Di LIPI ia pertama kali bergabung dengan Pusat Penelitian Geoteknologi sambil melanjutkan studinya di Johannes Gutenberg Universitas, Jerman. “Saya merasa ilmu saya pada waktu itu masih sangat sedikit. Banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari. Makanya saya sekolah sambil bekerja di LIPI,” ujarnya.

Karir Iskandar tidak lama kemudian melejit menjadi professor riset di Bidang Geologi Dan Geofisika. Karir inilah yang bertahap mengantarkan dia menjadi orang nomor satu di LIPI.

Sempat terlambat

Ketika ditanya mengenai pelantikannya menjadi Kepala LIPI, peneliti kelahiran Cirebon, 55 tahun yang lalu ini mengakui bahwa ia

sendiri terlambat mendapatkan informasi. “Saya sedang tidak di Jakarta, sedang bertugas di Tual, Maluku. Di sana susah sinyal,” ungkap pria berkaca mata ini sambil tertawa kecil.

Siapa sangka Iskandar lolos menjadi Kepala LIPI setelah melewati seleksi terbuka calon kepala LIPI yang dilakukan di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dan bersaing dengan delapan calon kuat lainnya. Delapan calon kuat lainnya itu terdiri dari Prof. Dr. Bambang Subiyanto (LIPI), Prof. Dr. Dewi Fortuna Khaidir Anwar (LIPI/Setwapres), Prof. Dr. Edvin Aldrian (BMKG), Prof. Dr. Estiko Rijanto (LIPI), Prof. Dr. Evvy Kartini (BATAN), Prof. Dr. Fahmi Amhar (BIG), Prof. Dr. Ikrar Nusa

Agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap riset bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa, baik dalam ranah dalam negeri maupun luar negeri

Bhakti (LIPI), dan Prof. Dr. Wimpie Agoeng Noegroho Aspar (BPPT).

Pelantikan Iskandar dijadwalkan pada Jum at, 17 Oktober 2014 lalu, pukul 20.00 WIB. “Saya bergegas dari Tual ke Ambon, dari Ambon ke Makassar. Baru saya terbang ke Jakarta. Saya baru tiba 15 menit menjelang pukul 20.00 WIB, jadi sempat pasrah juga terlambat,” kenangannya.

Beruntung, pihak LIPI dan Kemristek mengundur pelantikan hingga pukul 21.00 WIB. Iskandar lantas dilantik oleh Menteri Riset dan Teknologi kala itu, Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta. Iskandar berhasil menggantikan Prof. Dr. Lukman Hakim yang telah menjabat sejak tahun 2010-2011.

Cita-cita memajukan penelitian

Saat ditanya mengenai peran LIPI bagi masyarakat, sosok yang murah senyum ini mengaku bahwa belum semua lapisan masyarakat merasakan hasil-hasil riset LIPI. “Hasil riset LIPI sangat beragam. Kita perlu komitmen pemerintah di berbagai sektor agar bisa saling menunjang, sehingga hasil riset yang ada bisa dan akan yang akan dihasilkan kedepannya lebih maksimal pemanfaatannya,” imbuh Iskandar.

Dikatakan oleh Iskandar bahwa hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih memajukan LIPI yakni masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, SDM LIPI harus ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, LIPI melakukan rekrutmen baru. Secara kualitas, LIPI harus memberikan kesempatan bagi para pegawainya untuk melanjutkan studi. “Secara bertahap, jumlah peneliti akan lebih ditingkatkan sehingga rasio peneliti yang saat ini masih rendah dibanding tenaga administrasi nanti akan berbalik,” ungkap Iskandar.

Selain permasalahan SDM, penajaman program dan kegiatan pun tak luput dari perhatian Iskandar. Selama ini program yang berjalan masih berbasis pengembangan kompetensi kedepujian, seharusnya semua elemen harus lebih terbuka dan bersinergi. “Infrastruktur dan anggaran yang terbatas juga menjadi hal-hal yang perlu ditingkatkan kedepannya. Selain itu, LIPI harus lebih aktif untuk mengembangkan jaringan. Selama ini kita terlihat lebih banyak menerima tawaran pembangunan jejaring. Kedepannya, jejaring yang akan dibangun harus memiliki target yang jelas dengan posisi yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat,” paparnya

Ia mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap riset bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa, baik dalam ranah dalam negeri maupun luar negeri. “Semoga ada keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan iptek, sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (IFR)



Sinar Lampu: pemandangan salah satu situs bersejarah di kawasan Kota Tua, Jakarta di malam hari. Tampak eksotis dengan sinar-sinar lampu, yang menyinari gedung-gedung yang tersisa dari peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda. Dahulu gedung tersebut merupakan kantor pemerintahan Gubernur Jenderal Hindi De Jong Bonifacius Cornelis de Jonge

DETRI WARMANTO (29), ARTIS SANGAT LENGKET DENGAN ANAK

Pasti Anda setuju bukan figur seorang ayah memang tidak bisa lepas dari perkembangan kognitif seorang anak. Kehadiran ayah konon katanya dapat membuat si kecil mempunyai kepercayaan lebih dan senantiasa merasa aman serta menjadi pribadi yang lebih kuat. Lantas seperti apa ya, kedekatan ayah selebriti satu ini

.....
Ditemui di Kediaman Para Menteri, Jl. Widya Chandra, SCBD, Jakarta. Artis Detri Warmanto, yang juga menantu dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo itu, terlihat sangat dekat sekali dengan kedua anaknya yang menggemaskan.

Lengket terus dengan Detri

Saat memasuki rumah dinas tersebut, si sulung, Kalila Ashalina Putri Warmanto (3) nampak manja dan lengket sekali saat digendong papahnya. Apalagi kondisinya ia sedang tidak enak badan. "Ya nih, lengket banget sama saya, apalagi lagi sakit begini, nempel terus," aku Detri sambil bercanda.

Tidak hanya si sulung Kalila, pemain film 3 Srikandi ini juga dekat dengan putranya Rafiiandra Sakha Putra Warmanto (2). Bahkan di saat sesi wawancara, Sakha (panggilan anak ke-2 Detri), yang pemalu itu nampak lebih nyaman dengan Detri.

"Biasanya setiap sesi pemotretan dengan keluarga tanpa saya, dia nangis terus. Jadi jangan berharap Sakha bisa senyum, dia *nggak* menangis aja udah syukur" terang artis kelahiran 1986 itu.

Benar saja, ketika sesi pemotretan dengan sebuah tabloid parenting, Sakha dengan papahnya sama sekali tidak menangis. Bocah bermata sipit itu hanya mau tenang saat di-pangkuan papahnya.

Hanya saja, saat berpindah gaya, Detri meminta kami untuk bersabar dan menunggu Sakha agar mau dipindahkan dari posisi pangkuannya. "Sebentar ya, pelan-pelan kalau sama dia, *nggak* bisa dipaksa nanti malah nangis," pintanya.

Beberapa kali mengambil gambar, Sakha memang terlihat bosan dan sedikit rewel. Detri langsung berinisiatif mengajak Sakha ke ruangan eyang-nya (Tjahjo Kumolo-red) sambil memainkan gitar, lalu bernyanyi untuk mengembalikan *mood*-nya.

Melihat kedekatan Detri dan Sakha, Kalila si kakak juga tidak mau kalah mendapatkan perhatian ayahnya, ia juga langsung ikut berdendang sambil bernyanyi kala Detri memainkan gitar di tengah-tengah sesi pemotretan.

"Saking dekatnya mereka sama saya, mereka sering berantem karena rebutan saya," cerita artis yang hobi berolahraga itu.

Tak tega marahin anak

Kedekatan Detri dengan anak-anaknya itu, tidak ingin ia nodai dengan memarahi kedua anaknya yang sudah berjenis kelamin lengkap itu. Suami dari Karunia Putri Pari Cendana itu sepakat, tugas memarahi anak-anak ia serahkan pada isterinya. "Karena saya kan banyak waktunya di luar, isteri yang lebih banyak mengurus anak. Jadi saya *nggak* mau waktu saya yang hanya sedikit ini, saya gunakan untuk marah-marah sama anak. Saya sudah sepakat dengan



isteri, kalau yang marah-marah itu lebih baik isteri, tapi saya *nggak* boleh membelanya atau tambah memarahinya. Jadi saat isteri marahin anak-anak, ya saya pura-pura diam saja," katanya.

Begitupun saat berkata 'tidak', Detri selalu tidak bisa menolak kala anaknya meminta bermain meski lelah seharian bekerja. "Karena saya sudah biasa dari kultur keluarga, ayah saya keturunan jenderal dan sibuk. Orangnya sangat dingin, dan jarang di rumah. Meski begitu kalau pulang kerja, saya selalu menungainya bermain kuda-kudaan, dan dia *nggak* pernah marah sama sekali. Nah, saya juga pengen punya waktu berkualitas sama anak, se-cepek apapun," paparnya.

Tak Boleh Keluar dari Rumah Mertua

Kedekatan dan kebersamaan Detri dengan anaknya, tidak hanya dirasakan oleh keluarga kecilnya, teta-

pi juga keluarga besar Tjahjo Kumolo di dalam rumah dinasnya.

Tinggal bersama mertua, dan sanak saudara lainnya di rumah dinas negara membuat Detri dan isterinya, Uni sempat berkeinginan pisah dari bayang-bayang mertua. Namun keinginan tersebut harus ditolak mentah-mentah oleh keluarga Uni. "Bapak bilang, ya udah kalau mau keluar, ya silahkan berdua aja tapi anak-anak sama kami," cerita Detri sambil menirukan ucapan Tjahjo, mertua Detri.

Tentu hal ini menjadi beban bagi Detri dan Uni apabila harus pergi tanpa memboyong kedua anaknya. "Eyangnya itu sayang banget sama cucu-cucunya. Apalagi kalau isteri lagi marahi Kalila atau Sakha tiba-tiba eyangnya datang belain anak-anak terus langsung ajak jalan-jalan dan beliin mereka mainan, kan jadi gimana gitu," ungkapkannya.

Tapi Detri sangat memaklumi, kasih sayang kakek-nenek ke cucunya memang seperti itu, tidak tega memarahi, dan selalu menuruti keinginan cucu. "Pada dasarnya saya pun besok akan jadi kakek, mungkin kalau sama anak kita bisa tega memarahi atau menasehati, kalau sudah sama cucu mungkin *nggak* akan bisa tega," paparnya.

Kedekatan anak-anak Detri dengan eyangnya bisa terlihat setiap pagi kala sosok Tjahjo Kumolo yang terlihat 'cool' di mata Detri, bisa bersikap beda saat karaoke dan berjoget bersama cucu-cucunya. "Tiap pagi mereka karaoke, bermain, bercanda, jadi kayak sosok yang beda dari biasanya," ceritanya.

Bahkan saking dekat dan sayangnya orang kepercayaan RI 1 itu terhadap cucunya, Tjahjo pernah belanja mainan hingga Rp. 16 juta! Wow banyak sekali ya!

HARUS BISA JAGA NAMA BAIK KELUARGA

Besar di keluarga terpadang dan berpendidikan, sudah pasti membuat Detri dan Isteri harus menjaga nama baik keluarga. "Bapak (Tjahjo-red) selalu memberi kebebasan anak-anaknya mau jadi apa terserah, asal di jalur yang baik," kata Detri yang lantas menceritakan Kakak iparnya seorang dokter gigi, dan adik iparnya seorang pilot.

Dia bercerita, pernah suatu ketika ia

menjadi korban kecelakaan tabrak mobil yang membuat mobilnya rusak parah. "Aku langsung kejar sampai ke rumahnya, dan ternyata yang nabrak anak ex-menteri juga. Langsung deh pemberitaan ramai. Ibaratnya aku yang benar aja bisa ramai, apalagi yang *nggak* benar. Makanya aku harus inget siapa aku, jaga sikap, jaga perilaku," jelasnya.

Hal itulah yang nanti akan ia terapkan pada anak-anaknya untuk senantiasa bersikap rendah hati dan

cukup berbekal ilmu agama. "Aku selalu pesan sama suster mereka, untuk biasa aja sama orang-orang, tidak perlu lah sesumbar cucu menteri atau anak artis. Kalau ada orang tanya baru jawab secukupnya. Jadi sekarang terbukti mereka biasa aja sama teman-temannya, tidak ada rasa genggang atau *nggak* enak. Karena dari Pak Tjahjo sendiri orangnya sangat sederhana, jadi kami akan malu kalau heboh atau pamer sendiri," tutupnya.

7 LANGKAH KEMBALIKAN BENTUK TUBUH PASCA-MELAHIRKAN

Umumnya setelah melahirkan banyak perubahan bentuk fisik yang dialami oleh kebanyakan ibu-ibu. Tubuh semakin melebar sudah pasti harus siap diterima bagi ibu yang baru saja melahirkan, belum lagi masalah *stretch mark* di daerah lipatan atau bekas jahitan di perut atau Miss. V.

Duh.. pasti enggak kebayang bukan betapa besarnya biaya perawatan yang harus dibayar demi mengembalikan bentuk tubuh seperti dulu. Namun Anda tidak perlu risau, di bawah ini ada tips bagaimana mengembalikan bentuk tubuh pascamelahirkan. Yuk simak ulasannya di bawah ini:

SETELAH MELAHIRKAN, BERCAK DI WAJAH HILANG

Menurut dr. Kardiana Purnama Dewi, SpKK pada dasarnya setelah melahirkan masalah hormon wajah pada ibu akan menghilang dengan sendirinya. "Yang perlu diketahui, jika selama mengandung si Ibu mengalami masalah hormon, seperti jerawat atau bercak-bercak. Pada saat dia melahirkan akan hilang dengan sendirinya.

Kecuali jika dia memang mempunyai faktor genetik," terang dokter cantik itu.

Nah, kalau sudah demikian, akan sulit sekali untuk dihilangkan. "Ada orang ketika hamil

santai saja tanpa perawatan, begitu melahirkan *stretch mark* hilang, namun ada juga yang sudah banyak perawatan namun justru semakin banyak. Hal itu perlu dibawa ke dokter spesialis untuk melakukan perawatan khusus seperti menarik kulit-kulit yang kendur," terangnya.

MENURUNKAN BERAT BADAN SECARA ALAMI

Nah, justru menurut dokter yang juga dosen Atmajaya satu ini, cara yang paling cepat dan alami adalah menurunkan berat badan pasca melahirkan. "Kalau masalah berat badan, proses pemulihan akan jauh lebih cepat melalui persalinan normal dari pada *caesar*. Yang normal, dalam waktu sebulan sudah bisa aktivitas, sudah bisa olahraga, jogging, dan sebagainya. Tetapi, kalau proses persalinan *caesar* paling tidak tunggu waktu tiga bulan baru bisa aktivitas berat seperti olahraga," ungkapnya.

Ada enam cara menurunkan berat badan secara alami yang bisa Anda lakukan di rumah pascamelahirkan, yakni:

1. BANYAK BERGERAK

Pasca melahirkan, untuk persalinan normal dalam jangka waktu 1-1,5 bulan badan sudah bisa stabil lagi, jadi Anda harus paksakan

untuk bergerak. Namun, selama masa *nifas* jangan melakukan aktivitas berat terlebih dahulu, lakukan saja jalan santai, dan pastikan semua baik-baik saja. Karena, bukan hanya jahitan di luar tetapi jahitan di dalam juga. Jika memaksakan, jahitan di dalam dapat terjadi komplikasi, seperti plasenta keluar dan sebagainya.

Sementara kalau untuk persalinan *caesar* butuh waktu 2-3 bulan, jangan paksakan olahraga jika kondisi belum stabil. "Kalau *caesar* kan masih ada luka. Ada perobekan yang besar dari luar dan dalam, jadi belum bisa dipaksakan untuk aktivitas yang berat. Seperti *gym shit-up*, tetapi kalau tidak ada komplikasi boleh dilakukan, jangan menunggu lebih lama," jelasnya.

2. TETAP MENYUSUI

Menyusui mempunyai manfaat membakar kalori. Setiap ibu yang menyusui akan membakar 500-700 kalori. "Makanya kalau menyusui sering lapar itu benar, karena banyak kalori yang terbakar. Nah, penting dicatat nih. Kalau sudah mau berhenti menyusui (saat bayi berusia 6 bulan atau 2 tahun ke atas), kurangi juga makanan yang dikonsumsi. Begitu juga saat bayi masuk usia ke 7 bulan, pelan-pelan ibu mengurangi makannya. Kebanyakan ibu rumah tangga kebablasan makan, sehingga begitu ASI diberhentikan dia tetap makan banyak, akhirnya enggak jadi kurus," bebernya.

3. PERHATIKAN KALORI DAN LEMAK MAKANAN

Penting sekali nih untuk yang ingin menurunkan berat badan, selama hamil. Selama sembilan bulan

mungkin Anda sudah terbiasa dengan makan bebas, cemilan, dan apa pun tanpa terkontrol, karena alasan untuk bayi yang dikandung.

Nah, sebaiknya setelah melahirkan jangan konsumsi makanan yang kebutuhan kalornya tidak berguna. Contoh soda atau keripik-keripik. Makan banyak yang protein seperti ayam daging, buah, sayur, dan produk-produk yang rendah lemak. Selain itu, makanlah sedikit tetapi sering.

Lebih bagus lagi makan setiap 3-4 jam sekali dengan makan *snack*, seperti buah-buahan, gandum, susu rendah lemak, dan *yogurt*. "Makan sedikit tetapi sering akan banyak membakar metabolisme. Tetapi kalau sekali makan terus banyak lalu kenyang dan setelah itu kosong lama, pembakarannya akan semakin lama dan sedikit. Sebenarnya tidak perlu di-*check* ke dokter, bisa lakukan sendiri. Pada prinsipnya konsisten, jangan

suka *icip-icip*, dan lebih baik makannya pelan-pelan," terangnya.

4. BANYAK MINUM AIR PUTIH

Air putih sangat bagus untuk meningkatkan metabolisme dan menjaga kesegaran tubuh.

5. CARI TEMAN UNTUK MEMOTIVASI

Sebaiknya Anda mencari teman yang sesama abis melahirkan, untuk memotivasi Anda dalam menurunkan berat badan.

6. TIDUR CUKUP

Orang yang tidurnya kurang, memungkinkan susah untuk menurunkan berat badan. Tidur yang cukup yakni 6-7 jam. Kadang-kadang ada juga ibu yang sehari-hari kerja, malamnya begadang menjaga bayinya sehingga membuat ibu kurang tidur. Alternatifnya adalah ibunya ikut tidur saat bayinya tidur. "Misal di malam hari dia bangun tiga kali, tidur hanya satu jam, berarti di jam siang hari ibu ikut tidur. Terutama di tiga bulan awal saat cuti, jadi kalau ditotal tujuh jam. Jangan terus buka mata," ungkapnya.

7. ATASI KULIT KENDUR

Masalah kulit kendur pasca-melahirkan, juga akan cepat pulih jika masih di bawah 40 tahun namun biasanya hanya terjadi daerah lipatan perut. Sekali lagi, kecuali jika ada faktor bawaan yang memang mudah sekali membuat kulit kisut dan kurang elastis kembali kencang.

"Ada yang pasca-melahirkan kisut-kisut dulu lalu hilang dengan sendirinya, tetapi ada yang tebal, cukup kenyal, meski saat hamil naik 20 kg tetapi kendurnya hanya sedikit," jelasnya.

Untuk yang mengalami keriput yang parah tidak bisa diatasi dengan metode biasa, perlu dilakukan konsultasi ke dokter untuk sedikit melakukan *treatment* mengencangkan kulit yang kendur. Namun hal itu bisa dicegah dengan pakai krim saat hamil, sehingga tidak terlalu kering dan keriput saat melahirkan.

Konsultan:
dr. Kardiana Purnama Dewi, SpKK

SOSOK DIBALIK PENULIS BUKU SIHIR HOGWARTS

Sebuah film tentang penulis buku panduan atau buku saku sekolah sihir Hogwarts, yang merupakan buku wajib sekolah sihir pada masa Harry Potter.

Kisah fantasi dunia sihir yang diadaptasi dari novel karya J.K Rowling akan kembali menghiasi layar *box office* di seluruh dunia. Film tersebut bakal memanjakan para penggemar film dunia sihir dan menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu. Film tersebut juga digadang-gadang bakal menyamai kesuksesan film *Harry Potter*.

Fantastic Beasts and Where to Find Them bercerita tentang Newt Scamander (Eddie Redmayne), seorang *magizoologist* (ahli hewan sihir) yang terkenal di dunia sihir, yang mengadakan perjalanan untuk menemukan dan mendokumentasikan makhluk-makhluk fantastis. Yang kemudian menginspirasi dia untuk menulis buku panduan sekolah untuk murid-murid Hogwarts dengan judul '*Fantastic Beasts and Where to Find Them*'. Dalam petualangannya Scamander tidak sendirian, ia ditemani ketiga orang sahabatnya Queenie (Katherine Waterston), Propertina Goldstein (Alison Sudol), dan Jacob Kowalski (Dan Fogler).

Dalam bukunya tersebut, Scamander menulis lebih dari 85 jenis sihir. Buku itulah yang kelak menjadi salah satu buku saku wajib di sekolah sihir Hogwarts, tempat Harry Potter dan kawan-kawannya belajar ilmu sihir. Berbeda dengan film *Harry Potter* yang terfokus pada permusuhan antara peran antagonis dan protagonisnya, film *Fantastic Beasts and Where to Find Them* banyak bercerita tentang perjalanan hidup Scamander yang mempelajari ilmu sihir. Ia mempelajari sihir bersama komunitas rahasia para penyihir.



Cerita perjalanan Scamander terlihat dari trailer yang dirilis Warner Bros sejak menit-menit awal. Trailer mempertontonkan adegan ketika Scamander hendak berpetualang ke New York pada 1926 dengan tas ajaib yang sudah usang membawa makhluk-makhluk ciptaannya. Namun, ketika pada tahap pemeriksaan koper Scamander mendadak berisikan baju dan perlengkapan.



Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller,

Rilis: 18 November 2016

Judul:
Fantastic Beasts and Where to Find Them

Sutradara:
David Yates

Penulis Naskah: J.K. Rowling

Pemain: Eddie Redmayne, Dan Fogler,

Sebuah insiden besar dalam dunia *wizard* terjadi sesuatu dan membuat koper ajaibnya tertukar. Insiden tersebut terjadi setelah adanya ledakan koper Scamander dan membuatnya tertukar. Serta membuat beberapa makhluk ciptaannya terlepas dan berkeliaran di New York. Ia pun harus menangkap kembali semua makhluk ciptaannya tersebut sebelum keadaan dunia sihir dan '*No Maj*' (sebutan untuk '*Muggle*' versi Amerika) semakin kacau.

Kecintaan Scamander pada dunia sihir, dengan obsesinya menciptakan makhluk-makhluk sihir yang aneh, membuat Scamander sempat diusir untuk beberapa waktu dari Hogwarts. Namun karena ia memiliki kesayangan Albus Dumbledore, keberadaannya yang kemudian menjadi aman.

Film *Fantastic Beasts and Where to Find Them* mengambil *setting* 70 tahun sebelum kisah Harry Potter dimulai, tepatnya pada era 1920-

dari dunia sihir Hogwarts dan tidak ada hubungannya dengan film *Harry Potter*. Film mengambil latar tempat di London sama dengan film Harry Potter, namun cerita dimulai dari New York sebagai kota pertama petualangan Scamander.

Para pecinta Daniel Radcliffe harus sedikit kecewa, pasalnya film yang diadaptasi tidak langsung dari novel karya J.K Rowling ini akan dibintangi oleh aktor berbeda dan terdengar baru di kalangan pecinta film fantasi dunia sihir. Adalah Eddie Redmayne yang dipilih untuk membintangi film ini. Pemilihan Eddie Redmayne sebagai karakter dalam film ini bukan tanpa alasan, Redmayne adalah aktor kawakan yang pernah membintangi belasan judul film. Ia populer setelah membintangi film *The Theory of Everything* yang memenangkan Stephen Hawking dan film *Danish Girl* berperan sebagai sosok *transgender*.

Seperti biasa, akting Redmayne selalu memberikan sentuhan lembut dalam setiap karakter yang ia perankan. Sehingga wajar setiap film yang ia bintangi selalu menyentuh hati



an. Menarik, karena dalam film ini seluruh pemain mengenakan kostum bergaya abad 20. Suasana kota klasik *nan* megah juga sangat ditonjolkan. *Fantastic Beasts and Where to Find Them* merupakan disebut-sebut sebagai trilogi pertama dari prakuel *Harry Potter*, meskipun Rowling kepada media membantahnya, bahwa film ini merupakan pengembangan

para penonton. Berkat aktingnya itu, ia berkali-kali diganjar nominasi penghargaan bergengsi. Setelah Golden Globes, Redmayne juga mendapat nominasi aktor pria terbaik dalam Screen Actors Guild Award 2016 (SAG Award 2016). Hingga saat ini ia telah menerima 49 nominasi dan 33 penghargaan bergengsi, termasuk

Film *Fantastic Beasts and Where to Find Them* sekaligus menjadi pengalaman pertama bagi Rowling untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan film berlabel Warner Bros ini.

Academy Awards, BAFTA Awards, Golden Globes dan SAG Awards.

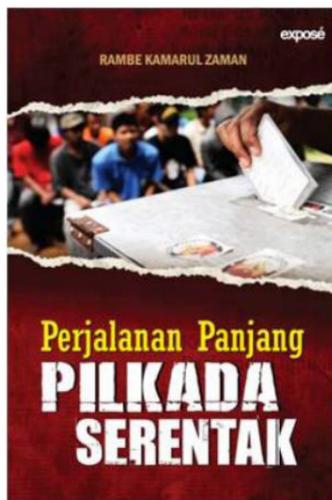
Film ini disutradarai oleh David Yates, dan dibintangi oleh para pemain papan atas seperti Colin Firth, Eddie Redmayne, Ron Perlman dan sebagainya. Film diproduksi oleh David Heyman, yang juga produser dari kedelapan film Harry Potter sebelumnya.

Film *Fantastic Beasts and Where to Find Them* sekaligus menjadi pengalaman pertama bagi Rowling untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan film berlabel Warner Bros ini. Dalam film ini, Rowling bertindak sebagai penulis skenario. Meski nama Rowling selalu menjadi sorotan layaknya sutradara dalam setiap film *Harry Potter*, sebenarnya ia tidak pernah terlibat langsung dalam proses film tersebut. Ia hanya penulis ketujuh novel tersebut yang kemudian dibuat film layar lebarnya. Novel *Harry Potter* sendiri telah terjual lebih dari 450 juta kopi di seluruh dunia. Delapan film dari novel tersebut dirilis dan mendapat keuntungan lebih dari US\$7 miliar di seluruh dunia.

Meski begitu para penggemar J.K Rowling mesti bersabar, pasalnya film *Fantastic Beasts and Where to Find Them* akan rilis November mendatang. Layak ditunggu! (msr)

MENELISIK PERJALANAN PANJANG PILKADA SERENTAK

Politikus Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman, mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 yang dinilai cukup sukses. Ia juga memaparkan bagaimana peran partai politik dalam membangun demokrasi yang lebih dewasa.



Judul: Perjalanan Panjang Pilkada Serentak
Penulis: Rambe Kamarul Zaman
Penerbit: Expose
Tahun: 2016
Halaman: 398 Halaman
Harga: Rp 89.000

Sejak awal reformasi, penyelenggaraan pilkada diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Perubahan dan penyempurnaan atas undang-undang mengenai pilkada juga dilakukan agar mekanismenya dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan harapan rakyat.

Pelaksanaan pesta demokrasi di daerah pun belakangan begitu meriah. Pilkada serentak menjadi budaya politik baru dalam bentuk kebebasan yang beradab. Setelah rakyat melaksanakan pilkada, pimpin daerah yang terpilih diharapkan memiliki integritas dan cakap dalam memimpin daerah.

Perjalanan pilkada serentak merupakan perjalanan yang membutuhkan perjuangan panjang. Perjuangan dengan tekad dan optimisme yang ada. Bagaimana tidak? Sejak dilaksanakan 2005 lalu, pilkada dianggap sebagai pesta demokrasi yang mahal. Dari sisi ongkos, setiap tahun negara menganggarkan biaya triliunan rupiah. Misalnya saja pilkada Jawa Timur periode Soekarno-Ipuk yang menghabiskan dana Rp 830 miliar untuk tiga putaran, sementara Jawa Tengah menghabiskan kurang lebih 650 miliar.

Hal itu baru dilihat dari segi penyelenggara, belum lagi jika dilihat dari sisi kandidat gubernur dan wakilnya yang banyak mengeluarkan ongkos untuk modal menjadi orang yang lebih 'sukses'. Sebab itulah, tidak heran produk pilkada langsung baru menghasilkan pemimpi bukan pemimpin.

Diakui memang, menurut Rambe Kamarul Zaman (penulis), Pilkada

serentak 2015 lalu masih menyisakan pekerjaan rumah yang setumpuk. Tidak sedikit Kepala Daerah yang masuk bui akibat korupsi.

Data Kementerian Dalam Negeri pada 2013 mencatat, sebanyak 309 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi, terdiri dari 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini. Data ini juga sesuai dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Selain itu, dari 269 daerah yang direncanakan melaksanakan pilkada serentak pada 2015, baru 209 daerah yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran KPU, sementara untuk NPHD anggaran pengawasan pemilu baru ditandatangani di 44 daerah.

Masalah penganggaran pilkada serentak tersebut memang tidak sampai mengganggu jadwal pilkada maju atau mundur, tapi paling tidak mengganggu konsentrasi para pelaksananya.

Menurut Rambe, Kementerian Dalam Negeri harus berkali-kali memanggil pemerintah daerah yang menghambat pencairan anggaran di tempatnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo tidak hanya sekali dua kali mengeluarkan surat edaran dan radiogram agar pencairan anggaran pilkada serentak berjalan dengan mulus, efisien dan efektif.

Namun kenyataannya, alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada serentak 2015 justru menunjukkan, metode penyelenggaraan pilkada tidak berhasil menghemat biaya selama kurang lebih satu dekade ini. Anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di 269 daerah mencapai Rp 6,89 triliun pada 2015.

Rambe juga mengevaluasi bagaimana pilkada serentak kemarin masih banyak regenerasi pemimpin yang menggunakan politik uang. Data dari Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mencatat, ada 910 kasus politik uang di pilkada serentak 215 yang hampir tersebar di semua daerah yang menggelar pilkada. Namun, 846 laporan politik uang dalam pilkada dihentikan prosesnya. Di antaranya berupa pemberian uang kepada pemilih sebanyak 829 kasus, dan 81 kasus pembagian barang.

Fakta kandidat selama pilkada melakukan politik uang dinilai begitu mencederai demokratisasi yang saat ini sedang kita perjuangkan. Namun, hal ini dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat. Survei dari KPK pada 2014 menyatakan sebanyak 71,72 persen masyarakat menganggap politik uang dalam pemilu adalah hal yang wajar. Budaya "wani piro" seakan masih mampu mengondisikan suara pemilih yang dapat dibayar.

Padahal sejatinya kunci untuk membangun demokrasi lokal yang substantif dan berintegritas ialah penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, bukan sekadar pilkada yang bersifat formalistik dan prosedural formal. Diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infrastruktur pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip pilkada

berintegritas secara praktiknya.

Semua pihak harus sama-sama membangun integritas yang pada akhirnya akan melahirkan integritas bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR No.1 VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Selain itu, dalam penyelenggaraan pilkada ada empat pihak yang berperan di dalamnya, yakni penyelenggara pilkada, peserta pilkada (partai politik), kandidat, dan pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Idealnya keempat ini sama-sama harus berintegritas.

Dalam buku ini, penulis memang banyak mengevaluasi mengenai pilkada serentak 2015. Padahal jika menelisik lebih dalam judul cover bukunya, yakni Perjalanan Panjang Pilkada

Serentak, Rambe kurang mengulas dan membandingkan Pilkada Serentak dari 2005 hingga 2015. Sehingga isi dalam buku ini kurang mewakili maksud dari judul buku itu sendiri.

Ia yang juga merupakan politikus asal partai Golkar dan ketua komisi II DPR RI Periode 2014-2019 sekaligus Ketua Fraksi MPR RI dari Partai Golkar itu, terlihat lebih banyak mengevaluasi kinerja Kemendagri. Padahal tugas dan penyelenggaraan pilkada serentak juga tidak bisa terlepas dari peran DPR dan MPR yang merancang UU, dan membantu dalam mengawal pilkada serentak.

Dalam buku ini juga tidak bisa lepas dari bayang-bayang 'Golkar', partai di mana ia berasal. Rambe seakan-akan membubung tinggi dan menilai par-

tai Golkar ikut berperan dalam kesuksesan pilkada serentak. Tidak ada otokritik untuk partai dan lembaganya sebagai salah satu elemen yang juga berperan penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

Namun secara keseluruhan, buku ini banyak memberikan informasi bagaimana evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2015, meskipun pendapat penulis sendiri masih dalam jumlah yang sangat sedikit, karena kebanyakan pendapat diambil dari beberapa buku sejenisnya seperti buku karya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tentang "Politik Hukum Pilkada Serentak", dan buku *Change Leadership* Non Finito karya Rhenald Kasali. (IFR)

Segecap Redaksi Media BPP mengucapkan:

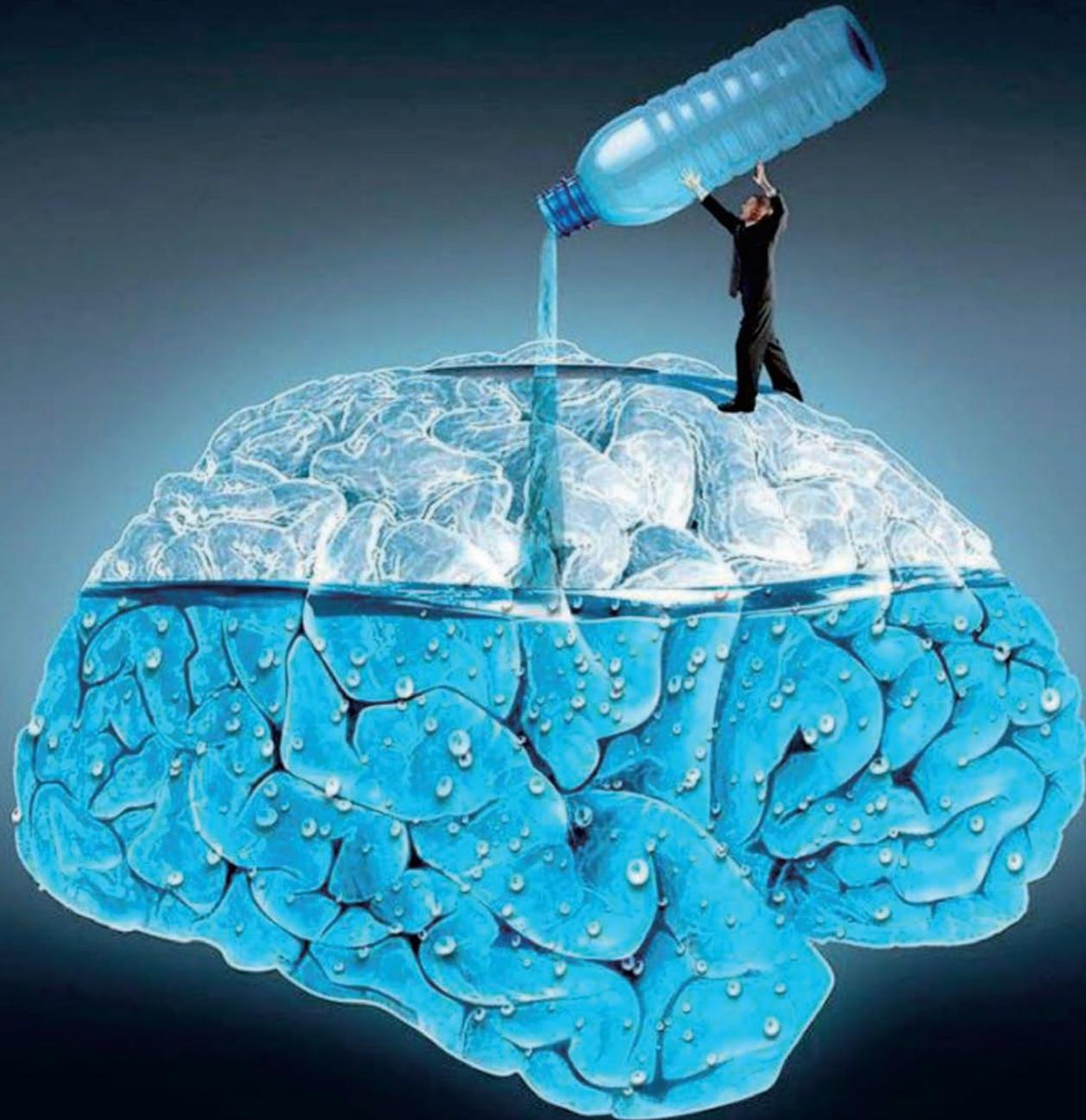
Selamat Menempuh Hidup Baru



Hazline
Anggia Putri

M. Irmansyah
Maududi

Pastikan Kebutuhan Otak Kita Terpenuhi



Otak kita membutuhkan cukup banyak oksigen agar bisa berfungsi secara optimal. Dengan meminum **8-10 gelas/hari air putih**, kita bisa memastikan bahwa kebutuhan otak telah terpenuhi.

sedikit2
Konspirasi!



BANG PEPE

POKEMON GO ITU
KONSPIRASI YAHUDI.
PIKACHU DALAM BAHASA
SYRIAC "JADILAH YAHUDI"
ARTI CAARMENDER DALAM
BAHASA SYRIAC
"TUHAN ITU LEMAH"



STOP...
PIZZA JUGA
KONSPIRASI YAHUDI!!



Getuk juga **DILARANG!**
dalam bahasa Suku Murshi
Etiopia 'GETUK' artinya
'AKU YAHUDI'



WASPADA
'GETUK, KONSPIRASI
YAHUDI'

Nasi juga **DILARANG!**
dalam bahasa Suku Kuvukiland
arti kata 'NASI' artinya
'AKU YAHUDI'



WASPADALAH!
NASI 'KONSPIRASI
YAHUDI'

ITU...
KAMU MAIN
FACEBOOK JUGA??



Dan sesungguhnya,
'FACEBOOK' itu hakikatnya
adalah **FASBULLAH**,
berasal dari kata
FISabilillah

semakin banyak
main Facebook
maka semakin banyak juga
beramal

Facebook
itu sejatinya adalah strategi dakwah,
Mark Zuckerberg itu sebenarnya
pendakwah bernama Mat Marzuki,
anaknya haji Asabullah,
camkan!



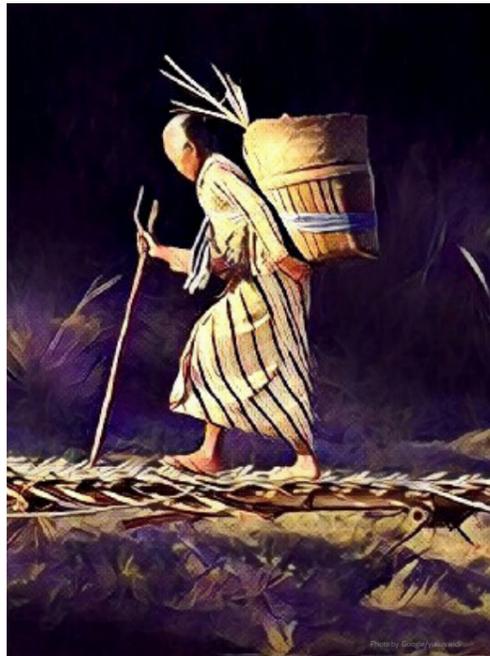
MTBAH TUGIYEM

Hari Taqwan Santoso

Mbah Tugiyem itu orang yang ramah, setiap sapa yang dia dapat dari tetangga atau sekadar orang asing ketika mereka berpapasan dengannya selalu dia balas. Sapa dibalas sapa, senyum dibalas senyum. Sewaktu masih hidup dulu nenekku, yang adalah teman akrab mbah Tugiyem, menceritakan bahwa perempuan renta itu seumur hidup tidak pernah membicarakan aib orang khususnya keluarga atau tetangganya. Kupikir alasannya adalah dosa, nanti dihukum malaikat di neraka atau semacamnya, seperti yang sering diterangkan guruku mengaji, tapi ternyata bukan.

“Buang – buang waktu! Daripada *ngrasani* orang mending waktunya buat cari daun jati,” kata nenek padaku, menirukan gaya mbah Tugiyem muda, ketika ditanya kenapa tidak mau ikut nimbrung untuk ngerumpi. Sedari muda, pekerjaan sehari – hari mbah Tugiyem adalah mencari dan mengumpulkan daun – daun jati yang masih segar di hutan, untuk kemudian dijual di pasar. Dulu daun – daun jati itu sangat berguna, biasanya untuk pembungkus tempe atau makanan pasar, sebelum digantikan oleh plastik yang sebenarnya merusak lingkungan tapi malah lebih banyak disukai orang itu.

Dulu mbah Tugiyem juga punya suami, tapi meninggal sebelum tahun pertama perkawinan mereka berdua terlewat. Katanya suami mbah Tugiyem itu terserang sesak nafas dan telat mendapat pertolongan.



Setelah suaminya meninggal, dalam benak perempuan itu tidak terbesit keinginan untuk kawin lagi sampai sekarang. Jadilah dia, nenek – nenek tua sebatang kara yang tinggal di pinggir desa, dan masih suka mencari daun jati kendati pangsa pasarnya kian hari kian surut, di samping tenaganya yang setiap hari semakin berkurang digerogoti usia.

Meskipun baik, tapi aku tidak pernah suka dengan mbah Tugiyem. Soalnya dia adalah orang yang gemar *nguri – uri* makam, dan setahuku tinggal dia satu – satunya orang di desaku yang melakukan itu. Ia suka menebar kembang dan membakar kemenyan di makam suaminya, kadang di bawah pohon serut yang tumbuh tak jauh dari situ. Kata guru ngajiku lagi, itu perbuatan musyrik, sesat.

Orang seperti mbah Tugiyem, sebaik apapun perilakunya pada orang, tidak akan masuk surga. Cambuk – cambuk api menantinya di neraka bersama para jin, setan dan danyang yang sering ia *uri – uri*. Karena keterangan guru ngajiku itulah, aku selalu bermuka masam kalau ketemu mbah Tugiyem. Siapa yang mau beramah – ramah dengan calon penghuni neraka? Jangan – jangan, kalau kita beramah – ramahan atau bahkan dekat dengannya, nanti juga bisa masuk neraka. Kan gawat.

“Ini Wahyu ya? Cucunya teman simbah,” kata mbah Tugiyem suatu ketika, saat aku sedang menyusuri tepian kali desa; jalanku pulang dari sebuah sekolah dasar di desa sebelah. “Nih, simbah kasih uang, buat beli permen.”

Dalam keterkejutan, aku menoleh meskipun sudah tahu itu mbah Tugiyem. Dan ketika kedua bola mataku benar – benar menyaksikan sosok perempuan tua itu, kaki – kakiku langsung ambil reflek lari tunggang – langgang. Aku selalu suka diberi uang jajan oleh orang, seratus atau dua ratus rupiah tak apa, masih bisa buat beli empat buah permen. Tapi apapun yang diberikan mbah Tugiyem harus kutolak, nanti aku kena getahnya. Kubayangkan aku diikat dengan rantai dari besi yang menyala merah-kuning sebab dibakar dulu, hanya gara – gara jajan dari uang pemberian orang yang nanti jadi penghuni neraka. Lagi – lagi, seperti kata guru ngajiku pak Dul Rohman. Sebenarnya laki – laki yang usianya tidak lebih tua dari bapakku itu tidak pernah menyebut nama Tugiyem secara langsung, tapi cerita – ceritanya tentang orang – orang calon penghuni neraka sama persis dengan nenek itu.

Baru beberapa langkah, aku ingat kata nenekku sendiri, kalau kita tidak boleh menolak pemberian orang lain karena akan menyakiti hatinya. Makanya, dalam upayaku lari dari jangkauan perempuan tua itu, aku masih sempat bilang, “Makasih mbah, saya masih punya uang buat jajan permen.” Maksudku beralasan, agar dia tak terlalu sakit hati karena tingkah lakuku.

Aku tidak menoleh, tapi kubayangkan dia tidak habis pikir kenapa tingkahku padanya selalu seperti itu. Dan meski merasakan aku memusuhinya karena suatu hal, perempuan yang sehari – harinya menjual daun jati di pasar itu membanjiri hari – hariku (juga orang – orang di desa) dengan senyum tuanya.

Orang seperti mbah Tugiyem, sebaik apapun perilakunya pada orang, tidak akan masuk surga. Cambuk – cambuk api menantinya di neraka bersama para jin, setan dan danyang yang sering ia *uri – uri*. Karena keterangan guru ngajiku itulah, aku selalu bermuka masam kalau ketemu mbah Tugiyem.

Tiga ekor gagak hitam terbang mengelilingi desa, berputar – putar lalu hinggap di dahan pohon Serut dekat tempat suami mbah Tugiyem dikuburkan. Sedari tadi paruh ketiganya terus mengeluarkan bunyi; bunyi khas burung gagak yang dikabarkan datang bersama berita kematian itu. Meskipun upaya pengusiran hal – hal mistis yang dilakukan oleh para “santri” dari kota di desaku boleh dikatakan berhasil, tetapi tidak semua kepercayaan orang – orang desa hilang begitu saja. Termasuk tentang burung gagak itu. Terbukti, ketika matahari mulai meninggi, orang – orang mulai menjalankan aktivitasnya masing – masing dan dari mereka pertanyaan tentang siapa yang akan meninggal hari ini mulai terdengar. Aku sih tidak terlalu paham obrolan orang dewasa, aku hanya tahu sekolah, mengaji dan bermain di sawah atau kali bersama teman – teman. Tapi ngeri juga mendengar kata “siapa yang mati hari ini” disebut – sebut orang.

“Le, beritahu kang Karno di langgar untuk menyiarkan kematian mbah Tugiyem, sekaligus mempersiapkan peralatan untuk mengurus jenazah.” Perintah bapak dari halaman rumah dengan terburu – buru.

“Tapi Pak, saya kan mau main kelereng sama teman – teman. Sudah janji, terlambat ini,” sungutku. Aku terkejut mendengar kabar itu, tapi tidak terlalu peduli juga. Aku baru pulang sekolah dan memang sudah ada janji dengan teman, tepat seperti yang kubilang pada bapak barusan.

“Kamu kan bisa main setelah itu. *Wong* cuma bilang ke marbot langgar, “mbah Tugiyem meninggal”, gitu saja kok. Sudah, cepat ke langgar sana!”

Aku langsung mengangguk, daripada bapak marah – marah, lalu kukayuh sepedaku ke langgar seperti yang diperintahkannya. Jalannya sedikit lebih panjang karena dari langgar ke tempatku main aku harus memutar desa, tapi tak apalah, aku kan bersepeda.

Sepulang dari main kelereng, kusaksikan orang kampung ribut – ribut. Sekali lagi, aku tidak terlalu paham masalah orang dewasa, dan tidak begitu peduli. Tapi aku ingat beberapa penggal dialog di babak akhir keributan itu. Pak Dul Rohim, guru ngajiku sedang menyampaikan keberatannya pada bapak. “Pak Darmanto ini bagaimana? Kita tidak pernah melihat mbah Tugiyem melakukan ibadah dalam bentuk apapun, kok mau dikuburkan sesuai

agama kita. Ya ndak boleh. Itu haram hukumnya.”

“Tapi Pak Dul. Apa kita layak menguburkan orang begitu saja? Seperti kita menguburkan hewan – hewan ternak ketika mereka mati. Sekadar biar tidak menebar bau. Bukankah itu tidak menghormati jenazah yang hendak dikuburkan. Apalagi, terlepas dari keyakinan mbah Tugiyem, beliau ini orangnya tidak pernah mengganggu tetangga. Saya saksiya,” bantah bapak.

“Pak Darmanto, dalam hal ini saya harus bertindak tegas. Saya bukannya tidak menghargai kebaikan mbah Tugiyem selama hidupnya. Tapi agama kita jelas – jelas melarang untuk menguburkan orang seperti mbah Tugiyem ini sesuai tata cara yang semestinya. Dan kalau kita memaksakan diri, maka kita yang akan kena getahnya di akhirat nanti, karena berarti kita melanggar aturan agama. Kita bisa masuk neraka.”

“Sudah – sudah. Begini saja. Saya tetap berkeinginan untuk memandikan dan menyalati mbah Tugiyem sebelum menguburkannya. Saya tidak memaksa orang lain untuk sesuatu, tapi saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya hanya minta tolong warga seperlunya saja, khususnya yang perempuan untuk memandikan jasad mbah Tugiyem. Nanti yang tidak mau, silakan mengurus hal – hal yang perlu diurus terkait jenazah dengan niat ‘biar jenazah mbah Tugiyem tidak menimbulkan bau.’ Warga pun setuju, dan memang sedikit yang membantu bapak. Tapi toh jasad mbah Tugiyem dapat dikebumikan dengan cara yang bapak inginkan.

Malamnya, kudekati bapak yang sedang duduk di teras depan. Aku sudah tahu kisah lengkapnya dari Ibu, tapi masih kurang. Aku ingin tahu alasan bapak bersikukuh tadi siang. Rupanya bapak dapat membaca niatku, jadi tidak heran kalau dia tidak heran ketika kutanya dia dengan agak lancang. “Kenapa bapak bersikukuh tadi? Bapak tidak takut masuk neraka karena melanggar larangan agama?”

Bapak mendengus pendek, tertawa kecil, baru menjawab. “Bapak tidak merasa melanggar larangan agama, Le.”

“Ha? Tidak...”

“Kita tidak pernah melihat mbah Tugiyem melakukan praktek ibadah dalam bentuk apapun, itu benar. Tapi bukan berarti dia tidak melakukannya. Prasangka buruk kita lah yang mengarahkan kita pada kesimpulan itu. Bapak tidak lihat kamu makan, bukan berarti kamu tidak makan, kan? Nyatanya kamu malah banyak makannya,” kata bapak sambil menggelitik perut buncitku.

Aku tertawa geli sebentar.

“Mbah Tugiyem itu teman akrab ibu bapak, yaitu nenekmu. Saking akrabnya, bapak merasa kalau dia seperti *budhe* sendiri.”

“Tapi pak, mbah Tugiyem kan suka *nguri – uri* kuburan dan pohon serut di dekatnya. Itu musyrik namanya, kata Pak Dul orang yang melakukan perbuatan seperti itu akan masuk neraka dan tidak tertolong lagi.”

“Memangnya kamu tau, apa itu *nguri – uri*, Le?” tanya bapak cepat.

“Menabur kembang dan membakar kemenyan di dekat tempat yang dikeramatkan,” jawabku tak terlalu yakin, tapi bapak membenarkan.

“Apa kamu yakin mbah Tugiyem mengeramatkan makam suaminya? Kita kan hanya lihat dia menabur kembang di situ. Kita tidak pernah tahu niatnya untuk apa. Kita tidak pernah tahu apa yang diucapkannya ketika melakukan itu. Kita katakan mbah

Tugiyem *nguri – uri* makam dan pohon serut itu karena kita suka berprasangka buruk saja. Bukankah prasangka buruk juga dilarang agama kita?”

Aku mengangguk.

“Dalam agama kita, seperti apa orang yang berprasangka buruk pada orang lain?”

“Seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri,” jawabku. Kalimat itu kuperoleh dari pak Dul Rohim juga.

“Bagus. Kamu memang cerdas. Sekarang kamu tidur sana. Bapak masih harus mempersiapkan pekasas sawah untuk besok.”

Prasangka buruk kita lah yang mengarahkan kita pada kesimpulan itu. Bapak tidak lihat kamu makan, bukan berarti kamu tidak makan, kan? Nyatanya kamu malah banyak makannya,” kata bapak sambil menggelitik perut buncitku.

JANGAN BIARKAN TANGAN KITA TERPASUNG SOCIAL MEDIA



“ Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bersocial media. fenomena social media seolah telah menjadi kebutuhan dasar yang menggantikan makan dan minum. ”

Opini Abdul Halik

MENCERMATI KEBIJAKAN PENELITI RANGKAP JABATAN

Bukan hal yang asing ketika mendengar istilah rangkap jabatan pada instansi pemerintahan. Karena rangkap jabatan, memang diperbolehkan. Namun, kadang kala posisi jabatan rangkap kerap tidak sesuai harapan. Dalam lembaga kelitbang, misalnya, tidak sedikit peneliti yang menjadi korban. Penunjukkan posisi jabatan sebaiknya mengutamakan kompetensi dan rasa keadilan. Kebijakan yang mengatur rangkap jabatan perlu ditinjau ulang, karena menyangkut efektivitas kinerja lembaga pemerintahan.

Rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebijakan tersebut diperkuat dengan kehadiran PP No 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap. Rangkap jabatan diperbolehkan bagi beberapa profesi ASN seperti Jaksa, Peneliti, dan Perancangan.

Beberapa pasal dalam PP No 29 Tahun 1997 secara tegas mengatakan, ASN dalam jabatan struktural boleh merangkap jabatan fungsional (Pasal 1). Selain itu, peneliti diperbolehkan merangkap jabatan struktural dengan tugas pokok yang berkaitan erat dengan bidang penelitian (Pasal 2, Ayat 2, Huruf a).

Di lain sisi, regulasi tersebut juga mengatur, ASN yang menduduki jabatan rangkap bisa diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya apabila telah mencapai batas usia pensiun pada jabatan struktural (Pasal 3). Tetapi, ASN tersebut masih bisa melanjutkan jabatan fungsionalnya.

Posisi rangkap jabatan akan mudah ditemui di beberapa kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan dunia kelitbang, tidak terke-

cuali di Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri,

BPP Kemendagri, sebagai lembaga penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi setiap kebijakan yang lahir dari Kemendagri, tentu memiliki dua posisi jabatan strategis yaitu struktural dan fungsional. Di lembaga tersebut akan mudah ditemui beberapa pejabat yang memiliki rangkap jabatan.

Namun, rangkap jabatan yang ada sering kali tidak diisi oleh ASN yang memiliki keterkaitan langsung dengan profesinya. Seperti contoh, posisi jabatan rangkap yang diduduki oleh peneliti. Tidak ada yang salah dan tidak menyalahkan aturan apabila peneliti diangkat dalam jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tertinggi seperti Sekretaris BPP, misalnya. Jabatan tersebut tentu di luar jabatan fungsional seperti halnya pusat-pusat litbang.

Namun akan lebih elok jika peneliti ditempatkan pada bidang administrasi yang ada di pusat-pusat litbang. Atau lebih tepatnya menempati posisi Kepala Pusat Litbang. Hal tersebut dikarenakan peneliti adalah pejabat fungsional keahlian bukan keterampilan. Di samping itu, Meski tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan tugas kesekretariatan, namun penempatan peneliti di pusat-pusat litbang, baik sebagai administrator, pengawas, maupun kepala pusat dapat bersentuhan secara langsung dengan keahlian peneliti, seperti kemampuan dalam melakukan pengkajian dan penelitian.

Dalam beberapa kasus rangkap jabatan di instansi pemerintahan, khususnya di BPP Kemendagri tidak lepas dari kebijakan “berhenti sementara”. Pemberhentian tersebut diberikan kepada peneliti yang merangkap jabatan struktural. Dalam arti lain, diberhentikan dari jabatan sebagai seorang peneliti, tetapi tetap

menjalankan tugas sebagai struktural.

Hemat penulis, dengan “mengesampingkan” kebijakan LIPI dan argumen fokus tugas, hal tersebut juga tidak tepat dilakukan. Seorang peneliti yang memiliki rangkap jabatan tidak boleh diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya secara langsung. Karena, jika hal demikian terjadi, maka tidak lagi berlaku istilah dan peraturan “rangkap jabatan,” melainkan menjadi “jabatan tunggal.”

Pada tataran inilah, konsistensi kebijakan rangkap jabatan dipertanyakan. Ketika peraturan sudah mematenkan istilah “rangkap jabatan,” maka konsekuensinya adalah dua jabatan yang diemban peneliti harus dilaksanakan, dengan catatan peneliti tersebut hanya menerima satu tunjangan jabatan (memilih yang menguntungkan). Selanjutnya, peneliti tersebut juga tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat fungsional peneliti, seperti menulis kajian dan melakukan penelitian, menjadi surveyor, dan lain sebagainya. Atas dasar itulah, kemudian menjadi relevan, jika peneliti rangkap jabatan perlu ditempatkan pada pusat-pusat litbang, bukan di lingkungan Sekretariat.

Selain tugas pokok dan fungsi peneliti rangkap jabatan, perlu diperhatikan pula kebijakan tunjangan kinerja (remunerasi) yang berlaku di seluruh komponen Kemendagri dalam sebuah aplikasi SIKERJA. Dalam hal remunerasi, misalnya, pembayaran tunjangan seharusnya mengacu pada salah satu kelas jabatan yang dipilih oleh peneliti tersebut. Seperti contoh Apabila memilih tunjangan jabatan fungsionalnya yang dibayarkan, maka pemberian tunjangan kinerjanya harus mengacu pada kelas dalam jabatan fungsional. Begitu pun jika peneliti tersebut memilih tunjangan jabatan struktural.

Begitu juga dengan sistem pengisian SIKERJA. Sistem tersebut selama ini dikecualikan bagi peneliti yang merangkap jabatan, dengan pembayaran tunjangan kinerja hanya dari uraian tugas jabatan. Aplikasi SIKERJA perlu menyesuaikan sebagaimana pengecualian di atas, seperti kelas jabatan yang ditetapkan dalam aplikasi SIKERJA mengacu pada tunjangan jabatan yang dipilih. Misalnya, jika peneliti rangkap jabatan tersebut memilih tunjangan jabatan fungsional yang dibayarkan, maka kelas jabatannya mengacu atau disesuaikan dengan kelas dalam jabatan fungsional.

Selanjutnya, perlu rancangan khusus aplikasi SIKERJA bagi peneliti yang merangkap jabatan dengan memuat sekaligus dua uraian tugas jabatan fungsional peneliti. Artinya, digabung antara uraian tugas jabatan struk-

tural dengan fungsional. Usulan pengecualian tersebut perlu dipahami oleh stakeholder terkait agar tidak merugikan peneliti yang memiliki jabatan rangkap.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan rangkap jabatan bagi peneliti antara lain, Pemerintah sebaiknya “tidak perlu” mengangkat peneliti dalam jabatan struktural apabila masih terdapat beberapa ASN non peneliti yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk menduduki jabatan struktural. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional, dengan harapan dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan mendorong menjadi peneliti profesional.

Peneliti yang diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi persyaratan dan kompetensi yang tinggi berkaitan dengan tugas-tugas jabatan struktural yang akan diemban, seperti keterkaitan latar belakang pendidikan, pengalaman, persyaratan Diklatpim, kemampuan manajerial, kecakapan dalam bidang administrasi, dan lain-lain.

Selanjutnya, perlu dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengangkatan calon yang memenuhi persyaratan administrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari promosi jabatan yang subjektif, misalnya, hanya berdasarkan usulan pimpinan. Uji kompetensi juga sebagai upaya dalam rangka mendapatkan pejabat struktural yang kapabel, dan menciptakan keadilan dalam memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada ASN non peneliti dan ASN peneliti. Selain itu perlu menerapkan sistem merit (kebijakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan) dalam kepegawaian, dan sebagainya.

Kontrak kerja dan surat pernyataan yang mengikat, sangat diperlukan dalam pengangkatan peneliti, bahwa peneliti yang diangkat dalam jabatan struktural tidak hanya melaksanakan tugas-tugas jabatan struktural (misalnya, tugas-tugas pengadministrasian saja), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan fungsionalnya.

Selain itu, peneliti yang memiliki jabatan rangkap harus memperhatikan ketentuan masa kenaikan jabatan fungsional agar terhindar dari sanksi pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagai peneliti.



Abdul Halik,
Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Opini Hasoloan Nadeak

MENINGKATKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di masyarakat menjadi tantangan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Tantangan tersebut bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi bagi pemerintah daerah sekalipun. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap warga negara sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Jika pemerintah tidak mampu memenuhi hak tersebut, maka negara telah gagal memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kementerian Dalam Negeri, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan cakupan akta kelahiran, telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri tersebut sebagai wujud dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di lingkungan Kemendagri.

Sebagai informasi RPJM 2014-2019 ditetapkan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015. RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun yang akan datang. RPJM sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis. RPJM juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyesuaian RPJM daerah demi mencapai sasaran nasional.

Cakupan Kepemilikan

Data Ditjen Dukcapil Kemendagri menyebutkan, pada 2016 secara nasional, kepemilikan akta kelahiran di Indonesia baru mencapai 65 persen. Untuk itu Ditjen Dukcapil terus melakukan segala upaya untuk menggenjot kesadaran

masyarakat akan pentingnya akta kelahiran. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu dengan terus mengampanyekan *tagline* "Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa, yang harus dilindungi dan dijamin haknya oleh negara" *tagline* lainnya seperti "Akta Kelahiran penting bagi kepastian masa depan anak." kata-kata tersebut juga menjadi *tagline* di seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah.

Namun beberapa upaya yang dilakukan Ditjen Dukcapil Kemendagri selama ini tidak merta membuat cakupan kepemilikan akta kelahiran di berbagai daerah mengalami peningkatan. Di Jawa Barat, misalnya, kepemilikan akta kelahiran masih jauh dari harapan. Dari total jumlah penduduk 42.196.469 jiwa, hanya sekira 6 persen penduduk yang memiliki akta kelahiran yakni 2.513.339 jiwa. Sementara sisanya sekira 94 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat, yaitu sekira 39.678.130 jiwa belum mempunyai akta kelahiran.

Kepemilikan akta kelahiran di Jawa Barat tersebar di beberapa kabupaten kota seperti kota Bandung 9 persen, Kabupaten Garut 5,73 persen, Kabupaten Sukabumi 5,3 persen, Kabupaten Ciamis 5,18 persen dan sisanya di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat lainnya.

Di sisi lain, upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, kian membawa hasil. Di balik kegagalan kepemilikan akta kelahiran di Jawa Barat, terdapat salah satu kota dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang membanggakan. Beberapa daerah di Indonesia dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran sebaiknya mencontoh Kota Balikpapan. Seperti diketahui kepemilikan akta kelahiran di Kota Balikpapan saat ini melebihi angka nasional 80 persen.

Belajar dari Balikpapan

Data Dinas Dukcapil kota tersebut pada Maret 2016 menunjukkan, kepemilikan akta kelahiran di Kota Balikpapan mencapai 80,60 persen dari total penduduk 735.850 jiwa, dan hanya 19 persen saja yang belum memiliki akta kelahiran yang tersebar di enam kecamatan dan 34 kelurahan. Dengan data tersebut, hampir bisa dipastikan, sisa jumlah penduduk yang belum terlayani akan dengan tuntas dilayani hingga akhir 2016.

Keberhasilan Kota Balikpapan dalam menjangkau kesadaran masyarakat tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam melakukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Komitmen tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan etika pelayanan, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

Di bidang etika pelayanan Dinas Dukcapil Kota Balikpapan mengeluarkan perintah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Kota Balikpapan No 6 Tahun 2014 tentang Janji Pelayanan. Janji tersebut di antaranya melayani dengan senyum, sapa, sopan santun, sigap dan selesai (6S), mengkomodasi keluhan, saran dan kritik, dan sebagainya.

Dinas Dukcapil juga membuat sebuah pedoman sikap dan perilaku pegawai dalam melayani masyarakat, yang tertera dalam Keputusan Dinas Dukcapil Kota Balikpapan No 7 Tahun 2014 antara lain, mewajibkan petugas penerima berkas berpaikaniaan rapi, bersih, sopan, dan pantas, mewajibkan sapaan pertama dengan kata selamat pagi, siang, atau sore, petugas juga diwajibkan menawarkan bantuan, serta tidak meninggalkan tempat sebelum jam pelayanan. Selain bagian penerima berkas, peraturan juga menetapkan larangan merokok bagi semua pegawai Dinas Dukcapil, serta bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Standar pelayanan menjadi bagian penting keberhasilan Kota Balikpapan. Kota tersebut juga menetapkan standar pelayanan kependudukan yang meliputi lima aspek di antaranya, pelayanan penduduk pendatang, pelayanan perubahan data (Penambahan/Pengurangan anggota keluarga, perubahan serta karena Peristiwa Penting), pelayanan pendaftaran penduduk tetap atau sementara WNA, pelayanan pembuatan surat pindah ke luar Balikpapan, serta pelayanan pembuatan surat keterangan domisili tempat tinggal. Sementara untuk jangka waktu yang penyelesaian dari masing-masing pelayanan ditentukan selama lima hari.

Sedangkan standar pelayanan catatan sipil, meliputi sembilan aspek pelayanan yaitu pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran, pelayanan penerbitan kutipan akta kematian, pelayanan penerbitan kutipan akta pengakuan anak, pelayanan pengesahan anak, pelayanan pengangkatan (adopsi) anak, pelayanan perubahan peristiwa penting pada kutipan akta catatan sipil, pelayanan penerbitan kutipan kedua (dan seterusnya) akta catatan sipil, pelayanan penerbitan akta perkawinan (non muslim), serta pelayanan penerbitan akta perceraian (non muslim).

Kinerja pemerintah Kota Balikpapan berbanding lurus dengan komitmennya. Mengutamakan kerja keras dan motto pelayanan seperti Sederhana, Mudah, Aman, Ramah, dan Transparan (SMART). Komitmen tersebut telah mampu menjawab tantangan kependudukan dan catatan sipil di Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan semestinya menjadi contoh bagi semua Dinas Dukcapil kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus terus mendorong peningkatan cakupan akta kelahiran di setiap daerah salahsatunya dengan mendorong kepala daerah melakukan terobosan-terobosan program.

Sebagai contoh, pemerintah bisa menjadikan beberapa kota yang dianggap paling berhasil dalam kependudukan dan catatan sipil, seperti halnya kota Balikpapan. Meskipun di daerah-daerah lain tidak menutup kemungkinan masih banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang berhasil, sebagai kota percontohan kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, daerah perlu melakukan inisiatif lebih dalam melakukan inovasi terkait hal tersebut, misalnya, dengan menghadirkan mobil layanan akta kelahiran untuk menjangkau ke tingkat kelurahan/desa.

Sebagai bentuk motivasi, pemerintah semestinya memberikan penghargaan kepada Kota Balikpapan, atau beberapa daerah yang dianggap berhasil dalam menjalankan pemerintahan khususnya bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, minimnya APBD Dinas Dukcapil di mana pun masih menjadi kendala. Pemerintah sebaiknya memberikan penambahan anggaran untuk suku dinas yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, kepala daerah perlu melakukan penambahan APBD kepada dinas tersebut, guna meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang. Dengan begitu, negara hadir sebagai pelindung warga negara dalam cakupan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Hasoloan Nadeak
Peneliti Madya
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri

Fenomena Dukun Merajalela

Nama Gatot Brajamusti dan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dua bulan terakhir ini ramai menghiasi pemberitaan media massa tanah air. Keduanya dicokok polisi karena telah melakukan penipuan atas nama agama. Dimas Kanjeng didakwa penipuan karena mengaku mampu menggandakan dan/atau mengadukan uang. Padahal, uang yang dimaksud adalah palsu. Sementara Gatot, selain menipu ia juga didakwa kasus narkoba, kepemilikan senjata api, satwa langka, dan pencabulan terhadap beberapa wanita pengikutnya.

Tidak sedikit yang menjadi korban keduanya. Mulai dari rakyat biasa, artis, sampai mantan anggota DPR yang berpendidikan tinggi, termakan tipuan Gatot dan Dimas Kanjeng. Tetapi herannya, kebanyakan di antara mereka yang jadi korban tidak merasa tertipu. Bahkan, tidak sedikit yang tetap bertahan dengan keyakinannya dan membela Sang Kanjeng dan Gatot. Mereka *ngotot*, kedua dukun tersebut memang benar-benar sakti yang memiliki *karomah* dari Sang Kuasa.

Fenomena di atas senyatanya cukup memprihatinkan. Di era modern seperti sekarang ini ternyata orang Indonesia masih banyak yang bisa ditipu dan memercayai praktik perdukunan yang sarat dengan klenik. Padahal tiada kekuatan apa pun yang mampu menandingi kekuatan Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak heran kalau wartawan, sastrawan sekaligus budayawan Indonesia, Mochtar Lubis, pernah mengungkapkan tentang ciri-ciri manusia Indonesia yang bisa dikatakan sebagai otokritik terhadap bangsa sendiri. Pendapatnya itu ia sampaikan dalam ceramah tentang "Situasi manusia Indonesia kini, dilihat dari segi kebudayaan dan nilai manusia" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 6 April 1977.

Menurutnya, manusia Indonesia masih percaya tahayul. Sejak zaman dulu sampai sekarang masih saja manusia Indonesia percaya tahayul, meski dalam bentuk yang berbeda. Itu sebabnya, praktik perdukunan tetap saja ada. Dukun yang dimaksud di sini bukanlah dukun beranak yang membantu persalinan warga di kampung yang memiliki makna denotatif, melainkan dukun dalam makna konotatif.

Secara umum, dikenal adanya "dukun putih" dan "dukun hitam", namun kategori ini sangat bergantung pada konteks sosialnya. "Dukun putih" untuk tujuan "baik", menolong, dan menyembuhkan; sedangkan "dukun hitam" untuk tujuan yang dianggap negatif, "jahat", melukai atau bahkan membunuh. *Nah*, Gatot dan Dimas Kanjeng ini agaknya masuk kategori "dukun hitam", karena, sudah menipu banyak orang.

Mengikuti pendapat Ki Ngawur Permana dan Nyi damar Sagiri (2016) dalam buku "Kitab Sihir: Rahasia Kuno", kebanyakan trik-trik dukun hitam itu lebih banyak menggunakan sugesti dan hipnosis, mereka sengaja berpenampilan layaknya seorang yang disegani. Padahal, dukun atau orang yang mengaku dirinya sakti tidaklah sesakti yang dikira kebanyakan orang. Mereka hanyalah orang yang bermain dengan kekuatan pikiran dan tidak berhubungan dengan makhluk halus atau jin apa pun.

Memang, ada paranormal yang menggunakan perangkat ritual seperti altar, dupa, kemenyan, dan media unik yang terkesan

memiliki kekuatan yang berasal dari makhluk halus seperti keris, rajah, dupa, kemenyan, patung tengkorak, lilin, kain hitam, ceke ayam, bulu burung unta, minyak mistik dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu digunakan cuma untuk menciptakan suasana mistik.

Suasana mistik tersebut akan membantu si dukun memberikan sugesti kepada korbannya, sehingga si korban akan lebih mudah masuk ke dalam zona keyakinan yang dia buat. Sugesti yang ditancapkan pun akan tertanam lebih dalam. Padahal, barang-barang mistis tersebut bisa kita beli secara bebas di pasar khusus yang menjualnya.

Agaknya, itu juga yang dipraktikkan Dimas Kanjeng, dukun pengganda dan/atau pengada uang. Kalau Gatot lain lagi, dia lebih fokus pada penggunaan narkoba untuk mengelabui pengikutnya. Kalau sudah diberi aspat, yang menurut dia adalah makanan jin, Gatot beraksi mencabuli pengikutnya. Jadi, dengan aspat yang tidak kain adalah narkoba, Gatot mengelabui pengikutnya. Diklaim dia mampu memberi ketenangan dalam menghadapi persoalan hidup. Seolah-olah dia adalah guru spiritual bagi pengikutnya, padahal hanyalah seorang penipu.

Fenomena dukun penipu berkedok agama yang merajalela ini, selain karena didukung persepsi masyarakat yang masih percaya tahayul dan klenik, juga merupakan sebuah gejala kultus di masyarakat. Pengkultusan masih terjadi karena krisis karakter. Banyak orang menempuh jalan instan dalam menyelesaikan masalah, seperti utang piutang, ambisi politik, dan jabatan.

Munculnya dukun penipu dengan menciptakan kultus untuk membangun kharisma melalui penampilan, kepintaran berbicara, dan retorika menggunakan argumentasi agama seakan mengafirmasi jalan instan itu. Sang dukun membuat masyarakat awam percaya atau taklid buta, sehingga merasa yakin dengan hal-hal yang *too good to be true*, seperti halnya menggandakan uang ala Dimas Kanjeng.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani hal itu tidak lain adalah penindakan hukum yang tegas kepada pemimpin kultus yang melakukan penipuan dan pelecehan seksual. Juga, pendidikan karakter sejak dini yang dimulai dari keluarga untuk pemahaman agama yang benar tentang apa yang perlu diimani. Gunakanlah akal sehat dan selalu bersikap kritis terhadap pelbagai hal!

Untuk itu, kita harus memiliki dua hal, yaitu kemauan bernalar dan data acuan. Yang dimaksud dengan kemauan bernalar adalah usaha keras untuk menggunakan pikiran atau akal sehat dalam menarik kesimpulan dan menentukan sikap terhadap suatu fenomena (kejadian, cerita, atau klaim-klaim) yang dihadapi. Sedangkan, data acuan adalah segala pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan yang relevan yang dapat digunakan untuk menilai atau menguji kausalitas suatu kejadian, kebenaran suatu cerita atau kebenaran sebuah klaim.

Orang yang tidak memiliki salah satu di antara ke dua hal tersebut cenderung kurang kritis dan bila tidak memiliki keduanya, yang bersangkutan cenderung akan mudah tertipu. Ini pulalah yang menimpa para pengikut Gatot dan Dimas Kanjeng itu.

Moh Ilham A Hamudy



JURNAL
BINA
PRAJA

CALL FOR PAPERS

Researchers, lecturers,
and public administration experts
are invited to contribute
their scientific papers
to Jurnal Bina Praja

theme

Home Affairs Governance

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance

Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

TERMS & CONDITIONS - Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 7000-8000 words in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper
on the theme of Home Affairs Governance
to jurnalbinapraja@yahoo.com

Published by:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Indexed by:



Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016